



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI AKREDITASI SEKOLAH PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN
NGABANG KABUPATEN LANDAK**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ERICK YOHANES
NIM. 014945523

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "IMPLEMENTASI AKREDITASI SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Pontianak, 22 Oktober 2010

Yang Menyatakan,

(Erick Yohanes, S.AP)
NIM. 014 945 523

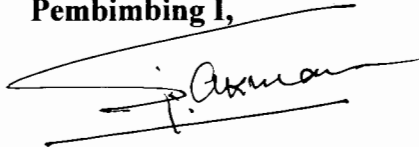
METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMBANGUN BANGSA
TOL
C6200AAF297878567
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

**JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI AKREDITASI SEKOLAH
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI
KECAMATAN NGABANG KABUPATEN
LANDAK**

**PENYUSUN TAPM : ERICK YOHANES, S.AP
NIM : 014945523
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK**

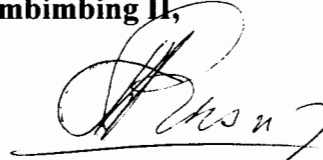
Pembimbing I,



Prof.H.Syamsuni Arman, Ph.D

NIP. 130605356

Pembimbing II,

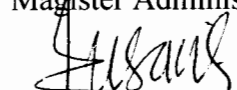


Prof.Dr.IG.AK Wardhani,M.Sc.Ed

NIP. 194012311961082002

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/Program
Magister Administrasi Publik


Dra.Susanti,M.Si

NIP. 196712141993032002



Direktur Program Pascasarjana,


Sriati, M.Si,Ph.D

NIP. 195202131985032001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : ERICK YOHANES, S.AP
NIM : 014945523
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul TAPM : IMPLEMENTASI AKREDITASI SEKOLAH PADA
 SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN
 NGABANG KABUPATEN LANDAK

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Dra. Susanti, M.Si

Penguji Ahli

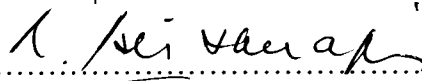
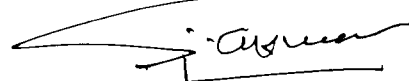
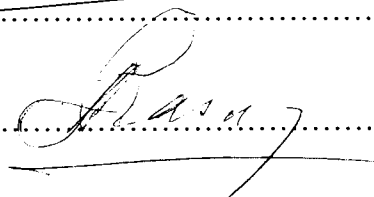
Prof.Dr. Aziz Sanapiah, MPA

Pembimbing I

Prof.H. Syamsuni Arman, Ph.D

Pembimbing II

Prof.Dr.IG.AK Wardhani,M.Sc.Ed

ABSTRAK

Implementasi Akreditasi Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak

ERICK YOHANES

Universitas Terbuka

E-mail: erick.yohanes@ymail.com

Kata Kunci : Kebijakan Akreditasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar, kualitas peserta didik.

Peningkatan mutu pendidikan nasional secara bertahap dan terencana dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XVI bagian Kedua tentang Akreditasi Sekolah. Akreditasi tersenut dilakukan untuk menilai kelayakan dan kinerja satuan pendidikan. Pada proses pelaksanaan akreditasi, pihak sekolah banyak mengalami berbagai kendala terkait yang terkait dengan persyaratan dan pemahaman akreditasi tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi akreditasi sekolah pada sekolah dasar negeri (SDN) di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis ingin menganalisis implementasi akreditasi yang dilaksanakan pada akreditasi SD Negeri di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak oleh BAS Propinsi Kalimantan Barat, (2) ingin menganalisis hasil akreditasi mengenai kinerja Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak oleh BAS Provinsi Kalimantan Barat, dan (3) ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses akreditasi sekolah pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak oleh BAS Provinsi Kalimantan Barat.

Rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini disebut bersifat deskriptif karena penelitian ini menganalisis dan menggambarkan secara cermat data dan fakta-fakta yang diperoleh. Untuk memperoleh data yang dimaksud, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yakni: (1) Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*), dan (2) Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu

pengumpulan data dengan membaca dokumen-dokumen tentang proses akreditasi dan dampaknya terhadap kualitas lulusan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaahan dokumen. Informan atau responden ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hal ini, penentuan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu, jadi bukan melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan pada teknik *random sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Sistem Akreditasi Sekolah yang diimplementasikan oleh BAS terhadap SDN di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak pada tahun 2008 telah dilakukan dengan baik dan memberikan dampak yang positif dalam upaya peningkatan kualitas siswa sekolah dasar. Kebijakan Sistem Akreditasi Sekolah yang dilaksanakan oleh BAS Kabupaten Landak mencakup kurikulum dan proses pembelajaran, administrasi dan manajemen sekolah, organisasi dan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah, ketenagaan, pembiayaan dan pendanaan, peserta didik, peran serta masyarakat dan lingkungan/kultur sekolah terhadap SD Negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan akreditasi sekolah adalah: (1) kepemimpinan sekolah, (2) sarana dan prasarana, dan (3) tenaga pendidik.

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRACT

The Implementation of School Accreditation at State Elementary Schools In Ngabang District of Landak Regency

ERICK YOHANES

The Indonesia Universitas Terbuka

E-mail: erick.yohanes@ymail.com

Keyword: School Accreditation Policy at Elementary School, students' quality

The improvement of national educational quality based on *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003* (enactment) regarding National Educational System the Regulation Number 20, Article XVI Part Two about School Accreditation is done gradually and well-plan. Accreditation is done to assess the worth and activities of each education unit. In the process of implementation, schools have faced many problems related to the requirements and understanding about the accreditation. With reference to those matters, this study is focused on the implementation of school accreditation at the state elementary schools in Ngabang district of Landak regency.

This study is aimed to: (1) analyze the implementation of accreditation at State Elementary Schools at Ngabang district of Landak regency by BAS of Kalimantan Barat Province, (2) analyze the results of accreditation on the efforts of the principals of Elementary Schools at Ngabang district, Landak regency by BAS of Kalimantan Province, and (3) know the factors which influence the process of accreditation at the State Elementary Schools at Ngabang district of Landak regency by BAS of Kalimantan Province.

The nature of this study is descriptive. It describes and analyzes the obtained data accurately. In order to obtain the data, this study applies several techniques for data collection, such as: (1) *field research* is done through interview, and (2) *library research* is done to study the documents of getting data and information about accreditation and its impacts towards the graduation qualities.

The data collection is done through interview, observation and documentary study. The informants or respondents of this study are determined based on purposive sampling techniques, in which the samples are determined purposely by the researcher. In relating to this research, sampling is based on certain criteria or consideration, or if not, through a selection process as it done in random sampling.

The findings show that the implementation of school accreditation system policies which were decided by the School Accreditation Board (BAS) at the State Elementary Schools in Ngabang district of Landak regency in 2008 has been done well and has positive impacts in improving the quality of the elementary school students (pupils). The implementation of School Accreditation System Policies

determined by BAS of Landak regency, which consist of curriculum and teaching learning process, administration and school management, organization and institution, equipments and school facilities, human resources, budgeting and funding, students, the roles of society and school cultural environment towards the State Elementary Schools. The factors that influence the implementation of school accreditation are: (1) school leadership, (2) facilities and structures and (3) teachers.

UNIVERSITAS TERBUKA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan kepada penulis, sehingga penyusunan Tesis dapat diselesaikan.

Tesis ini berjudul “Implementasi Akreditasi Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak”. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih adanya terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangannya. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan bagi diri penulis. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa mulai dari penelitian hingga selesainya penyusunan tesis ini bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Syamsuni Arman, Ph.D, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
2. Prof. Dr. IG. AK Wardhani, M.Sc, Ed., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak beserta seluruh staf yang telah memberikan data dan informasi yang penulis perlukan dalam penelitian ini.

4. DR. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si., sebagai Bupati Kabupaten Landak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka menjalankan tugas di bidang pendidikan.
5. Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak beserta staf, yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam penyelesaian tesis ini
6. Rekan-rekan seperjuangan (mahasiswa) Pascasarjana UT yang telah memberikan dorongan moral untuk menyelesaikan studi pada program S2 ini.
7. Istri dan Anak-anak tercinta dan tersayang yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan, dorongan, semangat yang diberikan pada penulis, semoga mendapat balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pontianak, Oktober 2010

Penulis

ERICK YOHANES
NIM. 014 945523

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i-ii
ABSTRAK	iii-iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii-viii
DAFTAR ISI	ix-x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	14
B. Kerangka Berpikir	29
C. Definisi Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	34
B. Populasi dan Sampel	35
C. Teknik dan Instrumen Penelitian	37
D. Prosedur Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	40

BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar Negeri di Kec. Ngabang	42
	B. Kinerja Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kec. Ngabang	70
	C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Sekolah Pada SD Negeri di Kec. Ngabang	88
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan	92
	B. Saran	94
	DAFTAR PUSTAKA	95

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Siklus Akreditasi dan Peningkatan Mutu Sekolah	8
Gambar 4.1. Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi SD Negeri Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak	43

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Pengumpulan Data	36
Tabel 3.2 : Kisi-Kisi Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	38-39

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Hasil Wawancara
3. Pedoman Observasi
4. Peta Kabupaten Landak
5. Denah Lokasi
6. Photo-Photo Kegiatan
7. Bio Data

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia pendidikan dihadapkan pada berbagai tuntutan yang semakin berat, terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia agar mampu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya menyentuh perubahan fisik sebagai akibat implementasi dari kemajuan iptek, akan tetapi juga menyentuh perubahan dan pergeseran aspek nilai dan moral dalam kehidupan masyarakat.

Djahiri (1999:2) mengemukakan bahwa “besarnya dampak globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang tidak disertai pembinaan nilai-nilai moral dapat menjurus kepada terjadinya dehumanisasi”. Pembinaan nilai-nilai moral merupakan esensi dari usaha pendidikan, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disingkat UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Republik Indonesia menggariskan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Sementara itu, fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti yang termaktub dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 berbunyi seperti berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab .

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Peningkatan mutu pendidikan yang mencakup berbagai aspek, seperti tenaga pendidik (guru), proses pembelajaran, dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, merupakan sasaran utama yang harus ditingkatkan dan dikembangkan agar tercapainya tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan pada UU Sisdiknas dan pembangunan nasional.

Pengertian lain pendidikan sebagaimana yang dikemukakan Muhammad (1981:5) bahwa:

“Pendidikan memiliki dua pengertian yaitu pengertian yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pendidikan yang bersifat umum adalah kegiatan yang memiliki pengaruh dalam pembentukan jasmani seseorang, akalnya dan akhlaknya, sejak dilahirkan hingga mati. Pendidikan dengan pengertian ini meliputi semua sarana, baik disengaja seperti pendidikan rumah tangga dan pendidikan sekolah; atau yang tidak disengaja, seperti pendidikan yang diperoleh secara kebetulan, dari pengaruh lingkungan yang bersifat alamiah dan kemasyarakatan. Pendidikan dengan pengertian ini, sama dengan kehidupan itu sendiri dan mungkin alam ini dianggap sekolah yang paling besar, yang mana belajarnya dimulai dari buaian hingga masuk ke liang kubur. Sedangkan pendidikan dengan pengertian khusus adalah semua media yang dijadikan untuk mengembangkan jasmani anak, akalnya, serta meliputi pembinaan akhlaknya (yang mulia)”.

Umar (dalam Mukminin, 2003:1) menyatakan bahwa:

“proses pendidikan dalam suatu sistem persekolahan saat ini sesungguhnya belum menerapkan pembelajaran secara tuntas. Akibatnya, tidak sedikit siswa yang tidak menguasai materi pelajaran meskipun sudah dinyatakan tamat dari sekolah, tidak heran pula kalau mutu pendidikan secara nasional masih rendah”.

Pernyataan tersebut di atas memberikan makna bahwa pembelajaran yang selama ini dilakukan belum mampu menjadikan siswa-siswa menguasai materi pembelajaran pada suatu jenjang pendidikan secara maksimal walaupun mereka sudah menamatkan pendidikannya pada jenjang tersebut. Oleh karenanya, perlu upaya yang serius untuk mencari solusi yang tepat dan akurat.

Secara umum upaya untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas telah menjadi salah satu program utama pemerintah yang disebut Tri Matra Mutu. Tri Matra Mutu tersebut mencakup tiga hal, yaitu: (1) Standarisasi Pendidikan, (2) Penjaminan Mutu Pendidikan, dan (3) Akreditasi Lembaga Pendidikan. Kemudian pada UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan nasional diarahkan pada sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu: (1) standarisasi, (2) evaluasi, (3) akreditasi, dan (4) sertifikasi. Oleh karena penelitian ini terfokus pada akreditasi lembaga pendidikan, maka penjelasan berikutnya akan diarahkan pada akreditasi lembaga pendidikan.

Pengertian akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Selanjutnya, proses akreditasi sekolah dikaitkan dengan arah dan tujuan, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi sekolah sebagai institusi belajar (Depdiknas, BASN, 2004). Sedangkan

tujuan daripada pelaksanaan akreditasi sekolah yang dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Memberi informasi bahwa sebuah sekolah atau sebuah program dalam suatu sekolah telah atau belum memenuhi standar kelayakan dan kinerja yang telah ditentukan.
- 2) Membantu sekolah melakukan evaluasi diri dan menentukan kebijakan sendiri dalam upaya peningkatan mutu.
- 3) Membimbing calon peserta didik, orang tua, dan masyarakat untuk mengidentifikasi sekolah bermutu yang dapat memenuhi kebutuhan individual terhadap pendidikan termasuk mengidentifikasikan sekolah yang memiliki prestasi dalam suatu bidang tertentu yang mendapat pengakuan masyarakat.
- 4) Membantu sekolah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- 5) Membantu mengidentifikasi sekolah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donator atau bentuk bantuan lainnya. (Depdiknas, BASN, 2004:6)

Akreditasi sekolah pada hakekatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan dan kinerja penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah. Dalam pelaksanaan penilaian tersebut berbagai aspek yang terkait dengan kinerja dan kelayakan itu diperiksa untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Penilaian yang dilakukan tersebut mengacu kepada kriteria atau indikator yang telah dibuat sehingga informasi mengenai akreditasi tersebut lebih akurat. Berkaitan dengan hal tersebut, landasan hukum akreditasi sekolah mengacu pada UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Bab XVI pasal 60, yang berbunyi:

- 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
- 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas public;
- 3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka;

- 4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (Depdiknas BASN, 2004:4)

Lembaga Pendidikan diarahkan pada mutu layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Standar mutu layanan kepada masyarakat telah dituangkan dalam peraturan pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan pendidikan. Sehubungan dengan hal itu, maka setiap sekolah secara bertahap dibina oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk dapat menuju pencapaian standar tersebut.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan tempat dilaksanakannya proses pembelajaran. Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan menengah yang dimaksud adalah (1) pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar; (2) pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan; (3) pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat, dan (4) ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Dirjen Pendidikan Islam, Depag., 2006:14).

Akreditasi dilakukan terhadap satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan. Landasan hukum mengenai pelaksanaan akreditasi bagi setiap lembaga pendidikan sekolah secara nasional ini adalah Surat Keputusan (SK) MENDIKNAS Nomor: 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah yang berlaku sejak tanggal 4 Juni 2002.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 039/O/2003 tanggal 8 April 2003 yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pengembangan sistem, kebijakan, pedoman, dan perangkat akreditasi sekolah, termasuk instrument dan petunjuk teknis pelaksanaan (Depdiknas, BASNAS, 2004:i).

Pada tingkat propinsi/kabupaten/kota, proses akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Propinsi, BAS Kabupaten/Kota, sekolah, dan pihak-pihak terkait yang berkompeten. Untuk Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar), proses akreditasi sekolah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri/swasta setiap Kabupaten dilakukan oleh BAS Propinsi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2005 tentang BAS Propinsi Kalimantan Barat. Oleh karenanya, pelaksanaan akreditasi SD Negeri, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat mengalokasikan dana akreditasi pada APBD Propinsi.

Hasil studi pendahuluan peneliti, akreditasi sekolah untuk SD Negeri yang ada di setiap Kabupaten telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun

2005. Secara umum, hasil akreditasi menunjukkan bahwa cukup banyak sekolah dasar negeri (SDN) yang memperoleh nilai dengan kategori yang memuaskan sehingga dapat membanggakan baik bagi sekolah, peserta didik, dan masyarakat. Secara khusus, nilai akreditasi SD yang termasuk kategori rendah masih cukup banyak terdapat di kabupaten Landak, terutama pada kecamatan Ngabang.

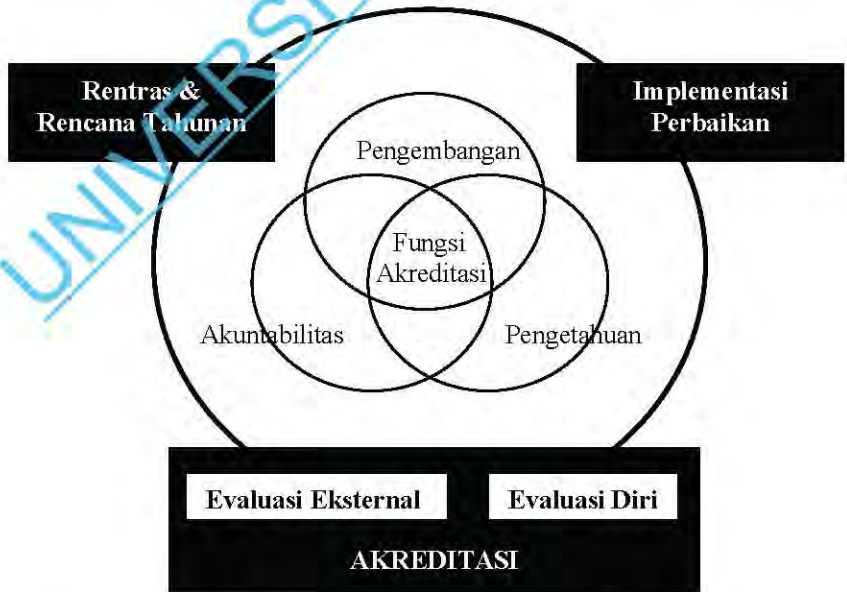
Sejak kebijakan akreditasi sekolah dilaksanakan oleh pemerintah, sebanyak 30 SD Negeri di kecamatan Ngabang, kabupaten Landak yang mengajukan sebagai peserta akreditasi. Namun demikian, SD-SD tersebut ada yang belum dapat diakreditasi karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam penilaian akreditasi tersebut, misalnya fasilitas yang belum memadai, jumlah tenaga pendidik yang tidak seimbang dengan jumlah murid dan lain sebagainya.

Ketidaksiapan SD Negeri di Kecamatan Ngabang untuk diakreditasi menunjukkan bahwa lembaga pendidikan formal itu masih belum siap untuk menerima kebijakan akreditasi sekolah yang dilaksanakan oleh BAS Propinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan akreditasi terkesan dipaksakan sehingga kurang mendapatkan respon atau dukungan dari berbagai pihak terkait, seperti kepala sekolah, guru, pegawai/staf sekolah dan masyarakat (khususnya orang tua murid).

Akreditasi sebagai proses penilaian terhadap kelayakan dan kinerja sekolah merupakan kegiatan yang bersifat menyeluruh dalam memotret kondisi nyata sekolah dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil akreditasi yang komprehensif tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berkaitan dengan penyusunan rencana

strategis sekolah untuk masa empat tahun ke depan dan rencana operasional tahunan sekolah. Mengacu kepada rencana strategis dan operasional sekolah tersebut, sekolah menyusun program kegiatan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang bersifat tahunan sebagai langkah implementasi dalam pengembangan dan peningkatan mutu sekolah secara terencana, terarah, dan terukur. Pada akhir masa empat tahun, sekolah kembali dievaluasi yang dilakukan baik secara internal (evaluasi diri) dan eksternal (asesor) yang merupakan bagian daripada kegiatan akreditasi sekolah. Secara umum hubungan antara kegiatan akreditasi dalam siklus peningkatan mutu sekolah tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.1 :
Siklus Akreditasi dan Peningkatan Mutu Sekolah**



Sumber: Buku Rapat Koordinasi dan Pelatihan Sistem Akreditasi Sekolah, (2004:7)

Sebagai upaya sekolah meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, program akreditasi dipandang sebagai kegiatan yang terintegrasi dengan program sekolah. Oleh karenanya, sistem akreditasi yang dikembangkan memiliki karakteristik yang memberikan keseimbangan antara: (1) fokus penilaian kelayakan dan kinerja sekolah; (2) penilaian internal melalui evaluasi diri oleh sekolah dan evaluasi eksternal oleh asesor; dan (3) hasil akreditasi untuk pemeringkatan status sekolah dan umpan balik peningkatan mutu sekolah. (Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah; 2004:8-10)

Standar akreditasi sekolah adalah kriteria tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan komponen-komponen pendidikan pada setiap satuan pendidikan TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK dan SMLB. Setiap sekolah harus memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS). Sekolah yang memenuhi standar minimal akan dinyatakan terakreditasi dan yang tidak memenuhi dinyatakan tidak terakreditasi. Karena standar yang digunakan untuk mengakreditasi sekolah adalah standar minimal. BASNAS mendorong agar sekolah mencapai standar yang lebih tinggi. Mengingat standar merupakan sesuatu yang bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan dan tuntutan, maka tingkatan standar juga akan berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pendidikan di masa depan.

Akreditasi dilakukan melalui tindakan membandingkan kondisi sekolah dalam kenyataan dengan kriteria (standar) yang telah ditetapkan. Mengingat sekolah sebagai sistem yang tersusun dari komponen-komponen yang saling

terkait untuk mencapai tujuan sekolah, maka standar yang dimaksud harus disusun berdasarkan komponen-komponen sekolah.

Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah melalui Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melihat mutu layanan kepada masyarakat yang diberikan oleh sekolah serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 087/U/2002 tanggal 14 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah, komponen-komponen sekolah yang menjadi bahan penilaian adalah :

- 1) Kurikulum dan Proses Pembelajaran,
- 2) Administrasi dan manajemen Sekolah,
- 3) Organisasi dan Kelembagaan Sekolah,
4. Sarana dan prasarana,
- 5) Ketenagaan,
- 6) Pembiayaan,
- 7) Peserta didik,
- 8) Peran serta masyarakat dan
- 9) Lingkungan dan Budaya Sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini difokuskan pada *pelaksanaan kebijakan akreditasi oleh pihak BAS, dan kinerja Kepala Sekolah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akreditasi sekolah pada SD Negeri Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak*. Sedangkan masalah penelitian yang lebih spesifik akan dirumuskan seperti pada rumusan masalah dibawah ini.

B. Rumusan Masalah

Secara umum, masalah penelitian ini adalah “Bagaimana proses implementasi kebijakan akreditasi sekolah yang dilaksanakan di SD Negeri Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan peserta didik?”

Dari permasalahan umum di atas, peneliti merumuskan masalah-masalah yang lebih spesifik dengan pertanyaan yang lebih operasional sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan akreditasi oleh pihak BAS pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?
- 2) Bagaimana kinerja Kepala Sekolah SD Negeri Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?
- 3) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akreditasi sekolah pada SD Negeri Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak?

C. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan otonomi pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi menuntut adanya perubahan dalam sistem evaluasi yang bukan saja mengemban fungsi pengawasan tetapi juga fungsi pembinaan dan pemberdayaan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Proses evaluasi diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu dan memberdayakan sekolah yang dievaluasi sehingga dihasilkan lulusan pendidikan yang sesuai dengan standar yang

ditetapkan. Merujuk pada pemikiran dan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. menganalisis proses pelaksanaan kebijakan akreditasi oleh pihak BAS pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
2. menganalisis kinerja Kepala Sekolah SD Negeri Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
3. menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akreditasi sekolah pada SD Negeri Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

D. Kegunaan Penelitian

Standar Nasional Pendidikan yang merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan pendidikan. Adapun untuk hal itu, maka setiap sekolah secara bertahap dibina oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk dapat menuju pencapaian standar.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi keilmuan maupun dari segi praktis, yakni sebagai berikut :

- a) secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah serta mewarnai perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya administrasi pendidikan.
- b) secara praktis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara konseptual kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait dalam perumusan kebijakan tentang akreditasi Sekolah Dasar Negeri (SD), serta

sebagai strategi yang dapat ditempuh bagi setiap SD untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan di masyarakat.

- c) Mendorong kinerja kepala sekolah dalam upaya mencapai standar layanan minimal kepada masyarakat.
- d) Sebagai bahan acuan bagi sekolah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan baik teoretis maupun praktis dalam menuju sekolah yang terpercaya dan profesional.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Pembangunan nasional di bidang pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2004:12) adalah: “Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, sehat, cerdas, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia”.

Selanjutnya arah kebijakan pendidikan UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga pendidikan sehingga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga pendidikan. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan

kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap dan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.

Berdasarkan arah kebijakan pendidikan sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa masalah pendidikan merupakan permasalahan yang harus ditangani secara optimal dan professional, termasuk dalam hal ini akreditasi lembaga pendidikan formal agar lebih ditingkatkan kualitas manajemen pengelolaannya dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, terampil, berbudaya, dan berpengetahuan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pendidikan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan merupakan aspek penting dari keseluruhan pencapaian tujuan. Jika suatu kebijakan tidak diimplementasikan, maka kebijakan itu hanya merupakan

impian belaka. Salah satu yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui sudah tercapai tidaknya tujuan suatu kebijakan, adalah pada teknis operasionalnya atau bagaimana implementasi kebijakan itu di lapangan.

Dalam pada itu, Hogwood dan Gunn (Wahab, 2002:71) menyatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna, maka ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi, yakni :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius;
2. Untuk pelaku program tersedia waktu dan sumber yang memadai;
3. Perpanduan sumber-sumber yang diperlukan benar benar tersedia;
4. Kebijakan yang akan diimplementasi didasari oleh satu hubungan kausalitas yang andal;
5. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
6. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan tentang tujuan;
7. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Berdasarkan pendapat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa implementasi suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan efisien dan efektif, bila tidak ditunjang dengan mekanisme yang baik pula. Proses implementasi suatu kebijakan merupakan kegiatan yang cukup mendasar dari keseluruhan proses lahirnya suatu kebijakan publik. Keberhasilan atau gagalnya suatu kebijakan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh sejauhmana komitmen aparat dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Pada dasarnya kebijakan berkaitan dengan sikap dari pemerintah atau pihak penguasa untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, tindakan atau sikap yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan terjadi apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu. Menurut Islamy (1994:45) bahwa “setiap kebijakan negara harus berorientasi pada kepentingan publik”. Sedangkan

menurut Anderson (dalam Islamy, 1994:30), bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diterapkan dan atau dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, demi untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Pada dasarnya hakekat pendidikan berkaitan erat dengan hakekat manusia, karena kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang pendidikan berhubungan dengan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam upaya mendidik dan mempersiapkan manusia menghadapi lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Joni (1985:21), yang mengatakan bahwa hakekat pendidikan antara lain :

- a. Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh kemampuan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik;
- b. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang begitu cepat;
- c. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat;
- d. Pendidikan berlangsung seumur hidup; dan
- e. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya.

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Arbi (1992:8), bahwa semenjak manusia dilahirkan telah dibekali dengan berbagai potensi-potensi, dalam kenyataannya belum terpolakan untuk menghadapi lingkungan hidupnya. Disinilah letak keterbatasan manusia sebagai pembawa potensi untuk berkembang selanjutnya. Oleh karena itu, agar potensi-potensi yang telah menjadi modal dasar dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bantuan, bimbingan dan pengarahannya dari orang-orang yang bertanggung jawab dan berpengalaman di bidang pendidikan tersebut.

Berbicara tentang masalah akreditasi sekolah, maka hal ini tidak terlepas dari masalah evaluasi diri dari lembaga pendidikan formal (sekolah) yang bersangkutan. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang menunjang sistem pendidikan, dapat berakibat pada ketidakberdayaan sekolah untuk merangkul berbagai masalah yang dihadapi oleh murid. Kegagalan yang dialami oleh sekolah dalam memperoleh nilai akreditasi yang tertinggi, dalam kajian teori pembangunan sering dianggap sebagai akibat dari ketidaktepatan dalam pemilihan program pembangunan yang dilaksanakan. Meskipun program pembangunan yang dipilih dan dilaksanakan tersebut bertujuan untuk menghindarkan diri jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan program (Korten dan Alfonso, eds, 1983).

Ketidakkampuan kinerja sekolah untuk meningkatkan mutu kelembagaannya dapat dihilangkan melalui mekanisme “efek tetesan ke bawah”. Logika dasar dari pendekatan ini adalah logika produktif, oleh karenanya Korten dan Klauss (1984:65) menyebut sebagai pembangunan yang berpusat pada

produksi. Dalam pendekatan ini, menurut Nugent dan Yotopoulos (1984: 107-120) ketidakmampuan kinerja suatu lembaga untuk meningkatkan kualitasnya dilihat sebagai proses yang akan terjadi dengan sendirinya sebagai fungsi dari manajemen organisasi kelembagaan yang tidak berjalan secara lancar (tidak produktif). Menurut Cernea (1988:30), bahwa untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, selain manajemennya harus diperbaiki terlebih dahulu juga diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Untuk itu, maka melalui pengaktifan seluruh potensi yang dimiliki masyarakat dapat didorong untuk memiliki inisiatif, bekerjasama dan bertanggung jawab bersama terhadap kelangsungan suatu lembaga. Dengan kata lain, melalui partisipasi masyarakat untuk terlihat langsung dalam suatu kelembagaan, maka akan dapat tercipta lembaga yang berkualitas.

Menurut pendapat Soedjarmoko (2984:35-45), bahwa untuk meningkatkan kualitas suatu lembaga maka harus dilakukan sendiri oleh pihak manajemen yang mengelola lembaga tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka dapat dikatakan bahwa antusiasme kegiatan yang ada dalam suatu lembaga merupakan ekspresi dari kegiatan yang berasal dari masyarakat bawah. Inisiatif masyarakat bawah berkaitan dengan inovasi atau penggunaan kembali teknologi yang tepat bagi kelembagaan.

Namun, salah satu ciri yang sangat mencolok yang terdapat di negara berkembang adalah sangat besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi dalam mengatur suatu lembaga formal yang dipimpinnya. Pemusatan kekuasaan ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan berbagai program kelembagaan,

yaitu dengan cara memusatkan pengelolaan dana, memusatkan pembuatan keputusan dan kebijakan, ataupun memusatkan pengendalian program. Kenyataan ini disebabkan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah negara berkembang untuk mengelola suatu lembaga formal masih sangat kurang.

Pemusatan kekuasaan pemerintah pada suatu lembaga inilah yang dikritik masyarakat golongan bawah. Masyarakat golongan bawah cenderung tidak mempercayai motif dan kemampuan pemerintah dalam mengelola suatu lembaga yang dipimpinnya, sehingga yang terjadi justru mengeksploitasi masyarakat demi dan atas nama suatu lembaga. Padahal menurut mereka, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki potensi untuk memecahkan persoalan yang dihadapi suatu lembaga melalui inisiatif bersama yang mandiri (Esman, 1991:30).

Sehubungan dengan hal itu, maka dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dari kinerja lembaga pendidikan formal tersebut, diperlukan adanya suatu unit organisasi sekolah yang secara khusus menangani kegiatan operasional di lapangan. Salah satu bentuk organisasi yang sering digunakan oleh suatu lembaga formal dalam upaya meningkatkan kualitasnya di masyarakat adalah terletak pada birokrasi. Menurut Katz (1985:5) hal ini disebabkan oleh birokrasi adalah satu-satunya organisasi yang memiliki akses penguasaan atas seluruh sumber daya. Oleh karena itu, di negara berkembang pada umumnya, aparat birokrasi dalam suatu lembaga formal adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program daripada organisasi kemasyarakatan lainnya. Tentang kemampuan birokrasi ini, Effendi (1987:4-7) mengatakan:

“Berbagai studi teoritis maupun empiris mengakui bahwa birokrasi yang sangat mengagungkan rasionalitas dan efisiensi merupakan bentuk organisasi yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan dan modernisasi. Sehingga dikebanyakan negara dunia ketiga, birokrasi pemerintah adalah alat pembangunan yang utama dan paling dominan perannya. Dominasi birokrasi ini terjadi bukan semata-mata karena kelemahan sektor swasta dan preferensi ideology di negara-negara berkembang, tetapi lebih karena luasnya jangkauan birokrasi memiliki fungsi integrative amat besar”.

Tjiptoherijanto dan Yumiko (1983:45-60) bahkan menyatakan bahwa pengaruh birokrasi terhadap lembaga yang dipimpinnya telah menembus hingga ke dalam masyarakat pedesaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memahami birokrasi, konsepsi Weber tentang manajemen merupakan konsep yang paling terkenal. Weber mengajukan teori birokrasi dalam kerangka teorinya tentang dominasi, dimana Weber menyebut hubungan kekuasaan melalui aparat *legal-rational-domination* sebagai birokrasi (Mouzelis, 1982:52). Weber yakin bahwa birokrasi rasional pasti bertambah penting dalam masyarakat modern. Hal ini disebabkan birokrasi memiliki serangkaian ciri-ciri: kecermatan, kontinuitas, disiplin, ketat, dapat diandalkan, yang membuat bentuk organisasi birokrasi paling memuaskan dari segi teknis. Baik bagi pemegang otoritas maupun bagi semua pihak yang terlibat dalam organisasi. Disini Weber menyatakan bahwa birokrasi merupakan proses yang tidak terelakan. Tetapi sebagai bagian dari proses ke arah rasionalisasi, maka birokrasi cenderung berimplikasi pada pemisahan orang-orang dari sarana produksi, dan pertumbuhan umum ke arah formalisme dalam organisasi.

Meskipun demikian pendapat Weber tentang birokrasi ini ditentang oleh Korten dan Alfonso. Dalam pemikiran Korten dan Alfonso (1983:35), manajemen

pemerintahan sangatlah tidak mungkin dilaksanakan. Hal ini menurut Effendi (1987:25) disebabkan karena antara birokrasi dan demokrasi merupakan sistem-sistem pemerintahan yang berlawanan dan tidak dapat dipersatukan. Analisis Effendi (1987) juga menunjukkan, organisasi birokrasi yang dibentuk untuk melaksanakan program pembangunan justru memperlemah kemampuan kelompok masyarakat untuk mempengaruhi program tersebut.

Kritik lain datang dari Tjokrowinoto (1992). Menurutnya birokrasi seringkali dibarengi dengan kekuasaan yang memiliki legalitas. Melalui kekuasaan yang legalitas ini para pejabat dapat mengatur bawahan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Kondisi yang demikian ini pada akhirnya menciptakan birokrasi, meskipun sebenarnya perubahan melalui mekanisme manajemen tidak diperlukan.

Lebih lanjut effendi (1986:18) setelah menyimak studi-studi yang dilakukan oleh Sjoberg, Brymer dan Farris (1966); serta Rein (1958) memperoleh kesimpulan bahwa organisasi birokrasi ternyata kurang mampu dan karena itu kurang cocok untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu lembaga. Di samping itu birokrasi bahkan cenderung mempertahankan ketimpangan yang terdapat dalam lembaga yang ada.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh para ahli sebagaimana tersebut di atas, nampak bahwa meskipun birokrasi merupakan bentuk organisasi yang paling ideal untuk meyalurkan program dalam upaya meningkatkan kualitas suatu lembaga, namun dalam prakteknya sifat birokrat yang melekat di dalamnya justru dapat menghambat tugas-tugas dalam pelaksanaan program yang

seharusnya dilakukan oleh lembaga. Meski bagaimanapun baiknya dan efisiensinya suatu birokrasi, namun di dalamnya selalu terdapat ciri dan keterbatasan yang tidak selalu sesuai untuk melaksanakan program.

Menurut pendapat Hadad (1983:8) hal ini disebabkan antara lain :

Birokrasi telah mempunyai pola kerja yang sudah mapan, dan langkah-langkah tindakannya harus selalu mengikuti kebijaksanaan umum atau menunggu petunjuk dari atasan, serta dilakukan melalui jalur formal dan jenjang hirarki yang cukup panjang. Keadaan ini membuat birokrat tidak mempunyai peluang yang cukup untuk mengambil keputusan atau bertindak dengan cepat, kurang punya kepekaan untuk memperhatikan masalah-masalah khusus dan kebutuhan khas kelompok masyarakat daerah pedesaan yang sering muncul silih berganti.

Menurut istilah yang digunakan Esman (1991:20), pendekatan birokrasi yang demikian itu disebut sebagai birokrasi tradisional. Pendekatan birokrasi tradisional ini, pada akhirnya akan menciptakan ketergantungan birokrasi di tingkat bawah kepada birokrasi di tingkat atas. Akibatnya kemampuan aparat birokrasi untuk melayani apa yang menjadi kebutuhan lembaga akan semakin kecil dan semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pelayanan birokrasi. Di samping itu, birokrasi tradisional cenderung bekerja dengan sistem terpusat, sehingga menghambat partisipasi masyarakat.

Perilaku aparat birokrasi menurut Thoha (1987:186) pada hakekatnya merupakan hasil interaksi antara individu-individu dengan lingkungan organisasinya. Individu-individu di sini adalah birokrasi yang memiliki

kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan, dan sebagainya, yang selanjutnya berinteraksi dengan karakteristik lembaga yang berupa tujuan lembaga, hirarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penghargaan, sistem kontrol dan sebagainya. Perbedaan dalam menginterpretasikan karakteristik lembaga ini, selanjutnya akan membawa dampak bagi pencapaian tujuan lembaga. Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang tepat tentang karakteristik suatu lembaga, sehingga diperoleh perilaku birokrasi yang sesuai dengan tujuan lembaga.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Tjokrowinoto (1992:33) menunjukkan bahwa sosok perilaku birokrasi yang tepat bagi upaya meningkatkan mutu dari suatu lembaga yang dipimpinnya adalah perilaku birokrasi yang dapat melaksanakan fungsi kelembagaan, yaitu menciptakan iklim agar bawahan dapat melaksanakan fungsi kelembagaan, yaitu menciptakan iklim agar bawahan dapat mengembangkan berbagai potensinya, baik potensi sosial, intelektual, mental spiritual, maupun fisiknya secara optimal, dan fungsi integrasi, diferensi struktural dan fungsional, serta tekanan bawahan terhadap sumber daya yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nampak bahwa perilaku birokrasi yang dipersyaratkan bagi pencapaian keberhasilan tujuan suatu kelembagaan adalah perilaku birokrasi yang kondusif dan adaptif terhadap tumbuhnya aspirasi masyarakat, mampu memberikan ruang gerak bagi bawahan untuk mengartikulasikan kepentingannya, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kegiatan kelembagaan.

3. Kebijakan Akreditasi

Upaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan akreditasi sekolah pada SD Negeri Kecamatan Ngabang, di sini tidak sekedar dibutuhkan perilaku birokrasi (Kepala Sekolah) yang bertindak sebagai penyalur pelayanan administrasi, tetapi lebih dari itu dibutuhkan perilaku birokrasi selaku pimpinan sekolah yang memandang masyarakat sebagai pendukung kegiatan akreditasi tersebut.

Dalam konteks penilaian kinerja organisasi pelayanan publik, Dwiyanto (1995:11) mengatakan lima indikator dalam penilaian kinerja birokrasi pelayanan publik. *Pertama*, produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. *Kedua*, kualitas layanan. Kualitas layanan cenderung semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk tentang organisasi publik muncul karena ketidakpastian dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. *Ketiga*, responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. *Keempat*, tanggung jawab yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik atau sesuai dengan kebijakan organisasi. *Kelima*,

akuntabilitas yaitu menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih rakyat.

Menurut Kumorotomo (Dwiyanto, 2002:20) bahwa kriteria yang dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain sebagai berikut :

1. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, kemampuan membayar hutang (solvabilitas), dan rentabilitas (hasil investasi) merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

2. Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan tersebut tercapai ? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.

3. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Keadilan menjadi hal yang sangat penting demi tercipta kedamaian. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau keadilan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan

pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu menjawab melalui kriteria ini.

4. Daya tanggap

Berbeda dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Berbeda dengan pendapat Zeithamil dkk (Fatminto, 2006:175) yang mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yaitu :

1. *Tangibles* atau ketampakan fisik, artinya penampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers.
2. *Reability* atau reabilitas adalah kemampuan untuk pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
3. *Assurance* atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customers.
4. *Emphaty* adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh providers kepada customers.

Pendapat di atas memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui aspek fisik pelayanan yang

diberikan, seperti tersedianya gedung pelayanan yang representif, fasilitas pelayanan berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung yang memiliki teknologi canggih, misalnya komputer, penampilan aparat yang menarik di mata pengguna jasa seperti seragam dan aksesoris, serta berbagai fasilitas kantor pelayanan yang memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat ditambah sikap dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Lenvinne (Ratminto, 2006:175) mengusulkan tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu: *resposiveness, responsibility and accountability*.

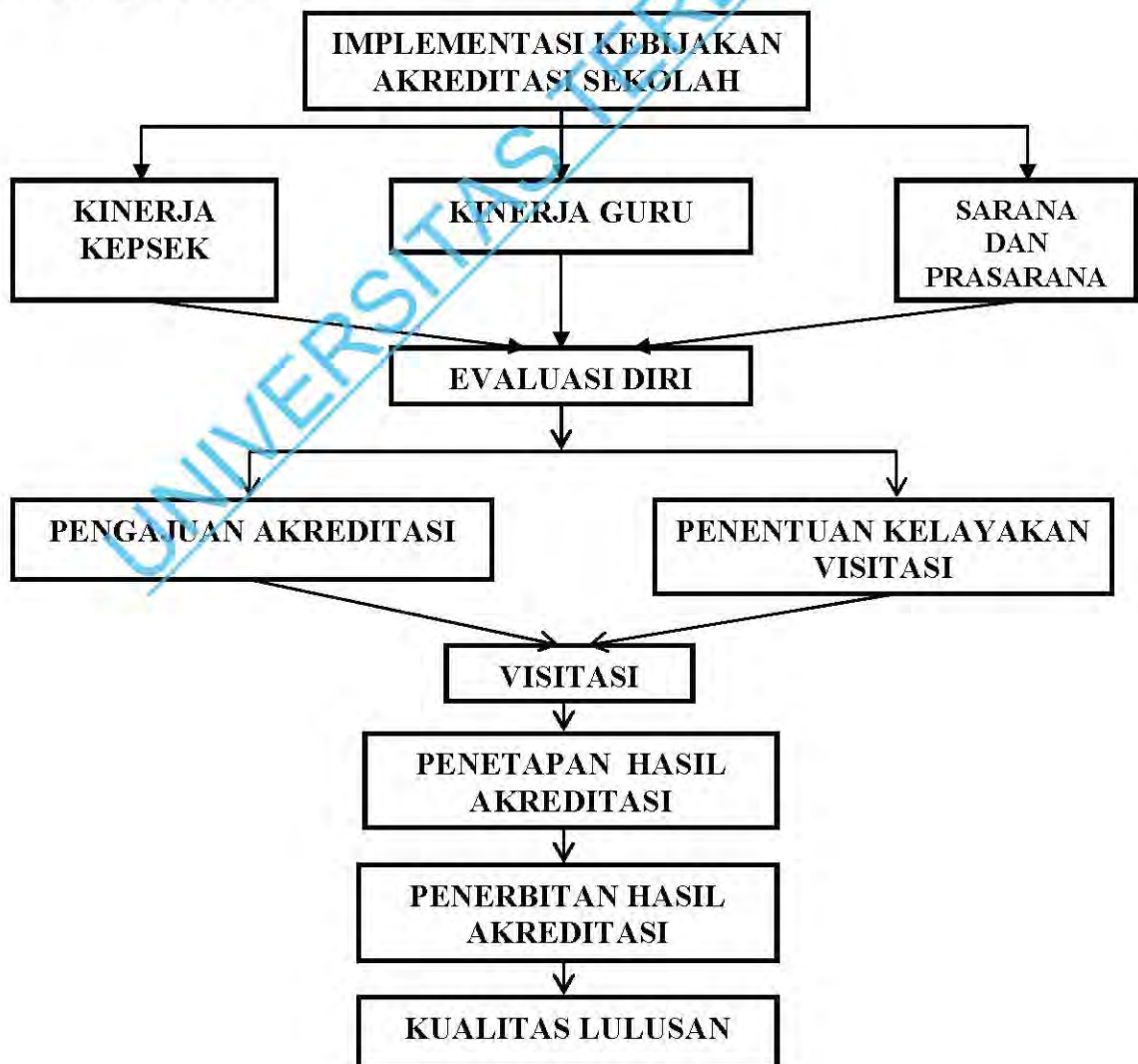
Sementara itu, Ratminto (2006:179) mengatakan bahwa untuk mengukur kinerja harus dipergunakan dua jenis ukuran, yaitu ukuran yang berorientasi pada proses dan ukuran yang berorientasi pada hasil. Adapun ukuran atau indikator-indikator yang berorientasi pada hasil adalah efektivitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan, dan keadilan. Ukuran yang berorientasi pada proses yaitu responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, keadaptasian, kelangsungan hidup, keterbukaan atau transparansi dan empati.

Berdasarkan beberapa pendapat dan penjelasan dari para ahli mengenai konsep-konsep atau pengertian tentang kinerja, pengukuran kinerja dan pentingnya pengukuran kinerja, maka penelitian ini menggunakan ukuran sebagai variabel kinerja pelayanan yakni akuntabilitas, responsivitas, efisiensi, orientasi terhadap pelayanan, dan fasilitas pelayanan.

Keadaan seperti ini nampaknya juga dipersyaratkan pada upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal SD Negeri melalui program akreditasi sekolah di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal pada SD negeri di Kecamatan Ngabang melalui program akreditasi sekolah, sangat diperlukan kinerja dari kepala sekolah (aparatur birokrasi) SD Negeri di Kecamatan Ngabang dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi sekolah. Tanpa kinerja yang baik dari pihak SD Negeri di Kecamatan Ngabang, dalam hal ini kepala sekolah dan seluruh jajarannya dapat dipastikan program akreditasi sekolah yang dilaksanakan BAS Propinsi Kalbar kepada SD Negeri di Kecamatan Ngabang tidak akan berjalan dengan baik.

B. Kerangka Berpikir



Penjelasan Kerangka berfikir, sebagaimana digambarkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Kinerja kepala sekolah, merupakan hasil dari pola kepemimpinan yang terbuka dan melakukan pendelegasian tugas dengan baik, dimana guru dan tenaga lainnya disekolah lain memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, Kepemimpinan kepala sekolah bersifat visioner dan transformatif. Kepala sekolah berperan sebagai manager dan pemimpin sekaligus.
2. Tenaga pendidik, secara umum adalah tenaga kependidikan sekolah bertugas melaksanakan perencanaan, pembelajaran, pembimbingan, pelatihan pengelolaan, penilaian, pengawasan, pelayanan teknis dan kepastakaan, penelitian dan pengembangan hal-hal praktis yang diperlukan untuk meningkatkan suatu proses pembelajaran. Karena itu tenaga pendidikan merupakan kunci bagi suksesnya pengembangan sekolah.
3. Sarana dan prasarana merupakan penjaminan terselenggaranya proses pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dan memberdayakan sesuai tuntutan karakteristik mata pelajaran, pertumbuhan dan perkembangan efektif, kognitif, psikomotor peserta didik. Ketersediaan, kesiapan dan penggunaan sarana dan prasarana merupakan hal penting bagi penyelenggaraan pendidikan disekolah.

Oleh sebab itu ketiga kumpulan diatas saling mendukung yang tidak dapat terpisahkan, guna kemajuan suatu sekolah dan merupakan persyaratan minimal untuk dapat di akreditasi.

C. Definisi Operasional

Akreditasi sekolah adalah penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan program pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi merupakan alat evaluasi diri (*self Regulation*). Agar sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya.

Akreditasi memiliki makna proses pendidikan selain itu, akreditasi merupakan penilaian hasil dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian bahwa proses akreditasi dalam makna proses adalah penilaian dan pengembangan mutu suatu sekolah secara berkelanjutan.

Landasan Hukum tentang pelaksanaan akreditasi sekolah, sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, perlu dilaksanakan pengembangan dan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu standarisasi, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi.

Standar pendidikan harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan yang menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas dalam mencapai standar nasional yang ditetapkan.

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun nonformal pada setiap jenjang

pendidikan, yang dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas public, dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Kebijakan Akreditasi, berdasarkan pada keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang akreditasi sekolah dan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 039/o/2003 tanggal 8 April 2003 tentang Badan Akreditasi Sekolah Nasional

Lingkup akreditasi sekolah meliputi TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, DAN SMALB, Baik negeri maupun swasta. Untuk TK, SD, SMP dan SMA, Akreditasi dilakukan terhadap kelembagaan secara menyeluruh, sedangkan untuk SMK, dilakukan terhadap program keahlian. Untuk TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB akreditasi dilakukan terhadap kelembagaan sesuai dengan jenis kelainannya (kekhususan).

Akreditasi dilaksanakan dalam rangka:

1. Memberi informasi bahwa sebuah sekolah atau sebuah program dalam suatu sekolah telah atau belum memenuhi standar kelayakan dan kinerja yang telah ditentukan.
2. Membantu sekolah melakukan evaluasi diri dan menentukan kebijakan sendiri dalam upaya peningkatan mutu
3. Membimbing calon peserta didik orang tua dan masyarakat mengidentifikasi sekolah yang bermutu atau sekolah yang memiliki prestasi dalam bidang tertentu, yang mendapat pengakuan masyarakat.

4. Membantu sekolah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru dan kerja sama yang saling menguntungkan.
5. membantu mengidentifikasi sekolah dan program dalam rangka pembinaan bantuan pemerintah. Investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lain.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif karena berusaha dan mencoba memberi gambaran secermat mungkin tentang keadaan yang diteliti. Penelitian deskriptif ini bertujuan mengungkapkan dan menganalisis fakta-fakta yang terkumpul dan tampak sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi saat penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen untuk menemukan data dan informasi tentang proses akreditasi dan dampaknya terhadap kualitas lulusan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pengertian populasi adalah seluruh individu atau objek/gejala/kejadian yang akan diteliti umumnya. Dalam suatu penelitian luas populasi sangat perlu diperhatikan sehingga dalam membuat kesimpulan tidak terlalu luas daripada populasi tersebut. Bogdan and Biklen (1982) menyatakan bahwa "*in qualitative research, the subjects are people interviewed and found in the research setting*" (dalam penelitian kualitatif, subjek adalah manusia yang di interview dan terdapat pada lokasi penelitian).

Populasi dalam penelitian ini adalah 139 sekolah dasar (SD) yang diklasifikasikan sebagai berikut: (1) 72 SD kegiatan akreditasinya dibiayai dari anggaran APBN, dan (2) 67 SD kegiatan akreditasinya dibiayai dari anggaran APBD Kabupaten Landak.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. SD yang menjadi sampel dikelompokkan berdasarkan lokasi, yaitu:

- 1) SD yang berlokasi dalam Kota Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak berjumlah 3 (tiga) sekolah, yakni: SDN 2 Ngabang, SDN 69 Emplasmen dan SDN 16 Ngabang.

- 2) SD Negeri di pedalaman Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak berjumlah 2 (dua) sekolah, yakni: SDN 23 Jelimpo dan SDN 45 Reo Majau.

Penentuan Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik random (*random technique*) dan didasarkan atas kriteria atau pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Lokasi Sekolah Dasar Negeri yang letaknya tidak jauh dari jalan raya
- 2) Memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai
- 3) Memiliki administrasi manajemen sekolah yang baik
- 4) Keberadaan Sekolah Dasar Negeri minimal sudah menamatkan siswa atau melaksanakan ujian.

Adapun untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menunjuk informan yang terdiri dari: anggota BAS berjumlah 2 orang, Kepala Sekolah berjumlah 5 orang dan Guru berjumlah 10 orang. Para informan tersebut mengetahui proses pelaksanaan akreditasi sekolah.

Tabel 3.1 Pengumpulan Data

Instrumen	Informan/Sumber Data	Waktu	Keterangan
1. Wawancara	Informan adalah anggota BAS 2 Orang, Kepala Sekolah 5 Orang dan Guru 10 Orang	3 Maret s/d 3 April 2009	Para informan sebanyak 17 orang dimintai keterangannya tentang kuesioner yang telah di isi.
2. Review Dokumentasi	Sumber data adalah buku/ dokumen yang ada, baik di secretariat BAS maupun di Sekolah	15 Maret s/d 3 April 2009	Perlu izin pada masing-masing pimpinan/ lembaga untuk dokumen yang diminta.

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan yang sesuai dengan masalah implementasi akreditasi Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang ditujukan kepada subyek penelitian yaitu informan (anggota BAS, Kepala Sekolah dan Guru) untuk mendapatkan data atau informasi yang kredibel dan akurat, khususnya yang berkaitan dengan akreditasi sekolah seperti: kurikulum dan proses pembelajaran, administrasi dan manajemen sekolah, organisasi dan kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana, keterangan pembiayaan,

peserta didik, peran serta masyarakat dan lingkungan budaya sekolah guna memenuhi kebutuhan analisis dalam penelitian ini.

b. Teknik Observasi

Adapun observasi dalam penelitian ini adalah berupa pengamatan terhadap gejala-gejala yang diamati dan muncul di lapangan berupa kurikulum dan proses pembelajaran manajemen administrasi sekolah, sarana dan prasarana, peserta didik, peran serta masyarakat dan kultur sekolah pada saat penelitian dilakukan berkaitan dengan implementasi akreditasi Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, untuk mendukung data dalam proses analisis yang dilakukan penulis.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun instrumen dalam penelitian ini mempergunakan alat pengumpulan data antara lain:

A. Pedoman Wawancara

Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini berupa susunan pertanyaan secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang menyangkut implementasi akreditasi Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngabang untuk dinyatakan kepada informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Check List

Alat yang digunakan dalam observasi ini adalah berupa catatan atau *check list*, yang berisikan obyek atau gejala yang akan diamati dan muncul di lapangan pada saat penelitian dilakukan berkaitan dengan implementasi akreditasi Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

Tabel 3.2

Kisi-Kisi Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

No.	Variabel	Indikator	Teknik/Instrumen	Sumber Data
1.	Proses Implementasi Akreditasi Sekolah	-Sosialisasi tentang Akreditasi -Evaluasi diri oleh kepala sekolah -Pengajuan akreditasi oleh sekolah -Penemuan kelayakan visitasi oleh BAS -L a y a k -Visitasi oleh asesor -Terakreditasi -Penerbitan hasil akreditasi oleh BAS	-Wawancara -Observasi -Wawancara -Observasi -Wawancara -Observasi -Wawancara -Observasi -Wawancara -Observasi -Wawancara -Observasi -Wawancara -Observasi -Wawancara -Observasi	- BAS/ Kepsek - Kepsek/ Guru - Dokumen BAS - Dokumen BAS - Dokumen BAS. Data Base Akreditasi - Dokumen BAS - Dokumen BAS - Dokumen BAS - SK - Sertifikat
2.	Kinerja Kepala Sekolah	-Pengambilan Keputusan -Keterbukaan dan Demokrasi -Pola Hubungan Atasan Dan Bawahan	-Wawancara -Wawancara	- Kepsek - Guru - Guru

3.	Kinerja Guru	-Pengembangan Masyarakat Belajar	-Wawancara -Observasi	- Guru - Masyarakat - Komite
		-Pengelolaan Pembelajaran	Dan -Wawancara -Observasi	- Dokumen Sekolah
		-Ketenagaan -Fasilitas Dan Keuangan -Akuntabilitas	-Wawancara -Observasi	- Dokumen Sekolah
		-Penyusunan Program	-Wawancara -Observasi	- Data - Dokumen Sekolah dan Guru
		-Sumber belajar -Sarana dan Prasarana	-Wawancara -Observasi	- Dokumen sekolah/eventa risasi barang - Dokumen sekolah, jam kerja
		-Kedisiplinan -Etos Kerja -Kerjasama -Inisiatif -Tanggung Jawab -Kejujuran -Prestasi Kerja	- Wawancara -Observasi	

C. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur dalam pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

- Peneliti memohon ijin penelitian dari berbagai pihak yang berwenang sehingga penelitian ini sah dilaksanakan.
- Mempelajari Buku Akreditasi untuk mengetahui secara jelas mengenai esensi dan data yang diperlukan pada proses akreditasi.
- Observasi suatu prosedur pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang berkaitan dengan implementasi akreditasi di SDN Kecamatan Ngabang misalnya sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain.

- d. Wawancara dilakukan dengan informan untuk mendapatkan data tentang akreditasi sekolah SDN Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- e. Memeriksa Kelengkapan Data yaitu suatu prosedur pengumpulan data yang tujuannya untuk mengkoscek kelengkapan data yang berkaitan dengan implementasi akreditasi SDN di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

4. Analisis Data

Metode pengolahan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data-data di lapangan lalu setelah data terkumpul selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori, sesuai dengan sifat dan jenisnya kemudian dianalisis agar terlihat jelas hasil dari penelitian ini. Dalam penafsiran dilakukan analisis berdasarkan teori-teori yang mendukung, kemudian akhirnya ditarik kesimpulan.

Peneliti mendasarkan pada pendapat Purwoko (1999:37), analisis data tersebut akan digambarkan dalam tahapan sebagai berikut: a) Reduksi data, langkah ini meliputi proses manipulasi, integrasi dan transformasi serta kategorisasi data. Reduksi data akan sangat membantu dalam mengidentifikasi aspek penting dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian untuk memfokuskan data yang terkumpul, sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan. Proses reduksi data meliputi: membaca dengan hati-hati identifikasi tema-tema utama dari proses penelitian, tingkah laku dan sebagainya; b) Pengorganisasian data, yaitu proses penyusunan kembali semua informasi sekitar tema tertentu yang

berkaitan dengan topik penelitian dan c) Interpretasi data, yaitu proses pembuatan keputusan dalam penyusunan kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngabang

Peningkatan mutu pendidikan merupakan faktor yang sangat penting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga kependidikan. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin melalui berbagai kebijakannya, di antaranya akreditasi. Akreditasi sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas public (Depdiknas, BASN, 2004).

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi berbagai faktor, seperti tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang handal, dan pengelolaan pelaksanaan proses pembelajaran serta administrasi yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya pemerintah melakukan akreditasi sudah tepat untuk menjadikan sekolah itu berkualitas, akuntabilitas dan kredibilitas di mata masyarakat. Landasan kebijakan akreditasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Pada Pasal 86 ayat (3) PP Nomor 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa: “Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil,

transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Pendidikan Nasional”.

Akreditasi sebagai proses penilaian terhadap kelayakan dan kinerja sekolah merupakan kegiatan yang bersifat menyeluruh dalam memotret kondisi nyata sekolah dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Proses akreditasi dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti gambar berikut:

Gambar 4.1
Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi SD Negeri Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak



Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa sebelum sekolah mengajukan akreditasi, sekolah harus melakukan evaluasi diri terlebih dahulu melalui pengisian instrumen Evaluasi Diri yang diterbitkan oleh BASNAS. Sekolah yang telah dinyatakan siap untuk melaksanakan evaluasi diri dapat **mengajukan** permohonan akreditasi kepada BAS kabupaten / kota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, sekolah juga menyerahkan instrumen evaluasi diri dan harus melampirkan surat persetujuan atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan terkait.

Instrumen evaluasi diri yang telah diisi oleh sekolah selanjutnya diolah oleh tim teknis BAS untuk menentukan apakah sekolah tersebut layak untuk dilakukan visitasi atau tidak. Layak dalam hal ini berarti tercapainya nilai minimal serta terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan oleh BAS. Tahap ini dikenal dengan penentuan kelayakan visitasi.

Penentuan kelayakan visitasi dilanjutkan dengan kunjungan/visitasi Tim Asesor yang ditugaskan oleh BAS ke sekolah untuk melaksanakan klarifikasi, verifikasi dan validasi terhadap data dan informasi yang telah disampaikan oleh sekolah melalui pengisian instrumen evaluasi diri. Tujuan dari visitasi tersebut adalah untuk meningkatkan kecermatan, keabsahan, serta kesesuaian antara fakta dengan data yang diperoleh melalui pengisian instrumen evaluasi diri. Dengan adanya visitasi tersebut, diharapkan dapat diperoleh data dan informasi tambahan mengenai keadaan yang sesungguhnya dari sekolah yang diakreditasi.

Semua hasil yang diperoleh dari kunjungan lapangan selanjutnya akan diolah oleh BAS untuk menetapkan nilai akhir dan peringkat akreditasi sekolah sesuai dengan kondisi nyata di sekolah yang dilakukan melalui rapat pleno BAS Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Hasil rapat pleno BAS tentang penetapan hasil akreditasi dituangkan dalam bentuk surat keputusan BAS.

Sebagai tahap akhir dari mekanisme pengajuan akreditasi, BAS akan menerbitkan sertifikat akreditasi sekolah sesuai dengan format dan blanko yang dikeluarkan oleh BASNAS yang memuat masing-masing komponen (dalam angka) dan peringkat / status akreditasi sekolah yang dinyatakan dengan huruf A

(amat baik), B (baik), dan C (cukup). Status akreditasi ini berlaku untuk kurun waktu 4 tahun sejak tanggal ditetapkannya

Akreditasi dilakukan melalui tindakan membandingkan kondisi SD Negeri di Kecamatan Ngabang dalam kenyataan dengan kriteria (standar) yang telah ditetapkan oleh BAS. Mengingat SD Negeri di Kecamatan Ngabang sebagai sistem yang tersusun dari komponen-komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan sekolah, maka standar yang dimaksud harus disusun berdasarkan komponen-komponen sekolah yang terdapat di SD Negeri di Kecamatan Ngabang tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 087/U/2002 tanggal 14 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah, menyebutkan bahwa komponen-komponen sekolah yang menjadi bahan penilaian untuk setiap SD yang ada di kabupaten/kota meliputi: (1) Kurikulum dan proses pembelajaran; (2) Administrasi dan manajemen sekolah; (3) Organisasi dan kelembagaan; (4) Sarana / prasarana sekolah; (5) Ketenagaan; (6) Pembiayaan dan pendanaan; (7) Peserta didik; (8) Peran serta masyarakat; dan (9) Lingkungan / kultur sekolah.

Berkaitan dengan SK Mendiknas tersebut di atas, maka komponen yang menjadi dasar penilaian pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang oleh Tim Akreditasi adalah 9 (sembilan) komponen sebagaimana tersebut di atas. Proses akreditasi pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang dapat diuraikan seperti berikut ini:

1. Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Dalam kebijakan dan pedoman akreditasi sekolah yang telah dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional Depdiknas (2004) ditentukan bahwa untuk penilaian standar kurikulum sekolah, ditentukan bahwa sekolah harus melaksanakan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal atau pilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya sekolah berpegang pada dokumen kurikulum dan silabus yang dikembangkan dengan mengacu kepada dokumen kurikulum tersebut. Di samping itu, sekolah harus memiliki kalender pendidikan dan jadwal pembelajaran yang jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kurikulum dibuat untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa apa yang diperoleh di sekolah benar-benar konsisten dengan prinsip dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum nasional. Meskipun sekolah diperkenankan untuk mengembangkan atau melaksanakan kurikulum yang menjadi ciri khas dari sekolah yang bersangkutan, namun kurikulum nasional harus tetap dilaksanakan sepenuhnya. Kekhasan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah merupakan tambahan terhadap kurikulum nasional, sehingga tidak mengurangi porsi kurikulum nasional. Selain itu, sekolah juga seharusnya melaksanakan kurikulum muatan lokal atau pilihan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan berbagai aspek yang menjadi ciri dan potensi daerah tempat sekolah berada atau kurikulum yang berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara global. Semua ini dikemas sehingga

silabus yang dikembangkan dan alokasi waktu yang disusun benar-benar menjamin bahwa kurikulum nasional dan muatan lokal atau pilihan tersebut terlaksana dengan baik.

Sebagai acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah, pihak sekolah berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Kurikulum sekolah disusun berdasarkan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal (mulok). Untuk penjabaran selanjutnya, kurikulum sekolah dilaksanakan sesuai dengan kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan jadwal pembelajaran. Dengan demikian untuk mengisi instrumen evaluasi diri, maka pihak sekolah harus memiliki kurikulum yang jelas, jadwal pembelajaran serta kalender pendidikan.

Selain itu, dalam proses pembelajaran juga harus melihat efektivitas guru dan murid dalam mengajar. Hal ini dapat dievaluasi dari tingkat kehadiran guru dalam memberikan materi pembelajaran. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi diri ini, kehadiran guru pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang dinilai dengan melihat daftar hadir guru dalam dua tahun terakhir. Untuk mengukur kehadiran para siswa ditunjukkan dengan kerajinan siswa dalam menghadiri proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan staf administrasi SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan), dapat diketahui bahwa kehadiran para guru dan siswa SD Negeri di Kecamatan Ngabang dalam proses belajar mengajar cukup baik.

2. Administrasi dan Manajemen Sekolah

Dalam menjalankan tugas pokok sebagai penyelenggara pendidikan, sekolah diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan manajemen sekolah. Sehubungan dengan hal itu, dalam penyusunan evaluasi diri, aspek administrasi dan manajemen sekolah ini juga dimasukkan dalam instrumen evaluasi diri. Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi manajemen, sekolah memiliki perencanaan sekolah yang jelas, yang ditunjukkan dari visi dan misi serta tujuan yang jelas. Adapun visi, misi dan tujuan tersebut harus diketahui oleh seluruh warga sekolah. Daripada itu, maka pada saat visitasi, tim assessor biasanya akan melakukan verifikasi data dengan cara menanyakan kepada guru dan siswa tentang visi dan misi serta tujuan dari penyelenggaraan pendidikan sekolah itu. Adapun kegiatan administrasi sekolah terdiri dari beberapa komponen antara lain:

a) Administrasi Program Pengajaran.

Administrasi program pengajaran terdiri dari beberapa butir komponen evaluasi. Adapun beberapa komponen tersebut antara lain tempat khusus untuk menyimpan dokumen atau arsip. Penilaian tertinggi akan diberikan dengan skor 10 poin (BAS Kabupaten) evaluasi semua dokumen atau arsip tersimpan dalam lemari filing cabinet dengan baik. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari staf administrasi sekolah, maka dapat diketahui bahwa SD Negeri di Kecamatan Ngabang untuk komponen ini mendapatkan skor nilai 10 poin (BAS Kabupaten). Disamping itu juga, administrasi program pengajaran juga dinilai dari

butir komponen program kegiatan sekolah. Hal ini tercermin dari ada tidaknya program kegiatan sekolah. Jika suatu sekolah memiliki program kegiatan sekolah dengan jelas, memiliki kalender akademik dengan jelas, maka skor nilai tertinggi akan diberikan sebesar 40 poin. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari salah seorang guru SD Negeri di Kecamatan Ngabang, bahwa untuk komponen ini SD Negeri di Kecamatan Ngabang mendapatkan skor nilai dari BAS sebesar 40 poin, hal ini dikarenakan semua arsip data atau dokumen SD Negeri di Kecamatan Ngabang tersimpan rapi dalam lemari khusus.

Tersedianya kalender pendidikan sekolah juga menjadi penilaian administrasi program pengajaran. Skor tertinggi sebesar 40 poin akan diperoleh suatu sekolah jika sekolah tersebut memiliki kalender sekolah yang jelas, seperti jadwal penerimaan siswa baru, hari-hari pemulaan masuk sekolah, kegiatan belajar mengajar, hari libur dan jadwal ulangan serta ujian akhir sekolah. Menurut informasi yang penulis peroleh dari staf administrasi sekolah, bahwa untuk komponen ini SD Negeri di Kecamatan Ngabang memperoleh skor nilai dari BAS adalah 40, karena pihak sekolah memiliki kalender sekolah yang jelas dalam mendukung proses belajar mengajar.

b) Administrasi Tata Persuratan dan Kearsipan

Berdasarkan ada tidaknya tempat khusus untuk menyimpan semua dokumen atau arsip administrasi sekolah, maka administrasi tata persuratan dan kearsipan dievaluasi. Adapun jika semua dokumen atau

arsip sekolah tersimpan dalam map ordner dan disimpan di lemari dalam keadaan baik, maka skor penilaian akan diperoleh sebesar 30 poin. Dalam kaitannya dengan administrasi tata persuratan dan kearsipan, setiap sekolah juga wajib memiliki dokumen pendirian sekolah. Skor yang diberikan sebesar 70 poin jika sekolah memiliki dokumen Surat Keputusan/Piagam/Keterangan/ Sertifikat tentang pendirian sekolah dari yayasan/penyelenggara sekolah, SK Pendirian Sekolah dari Kanwil/Kadinas Pendidikan setempat, Piagam Nomor Data Sekolah. Adapun administrasi tata persuratan dan kearsipan juga dinilai dari ada tidaknya dokumen notulen rapat, buku piket dan buku tamu umum dan supervisi dari sekolah yang akan diakreditasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan staf administrasi Sekolah SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan), maka dapat diketahui bahwa untuk penilaian administrasi tata persuratan dan kearsipan SD Negeri di Kecamatan Ngabang yang diberikan oleh pihak BAS secara keseluruhan adalah sebesar 70 yang terdiri dari muatan dokumen evaluasi diri, pengajuan akreditasi serta penentuan kelayakan visitasi. Adapun diperolehnya nilai 70 ini menurut pengakuan dari pihak staf administrasi sekolah SD Negeri di Kecamatan Ngabang, adalah meskipun semua dokumen atau arsip sekolah tersimpan dalam map ordner dan disimpan di lemari dalam keadaan baik, sekolah memiliki SK Pendirian sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan setempat, namun sekolah

tidak memiliki dokumen notulen rapat sekolah atau rapat dewan guru, buku piket dan buku tamu umum dan supervisi.

c) Administrasi Kepegawaian

Kepegawaian merupakan salah satu unsur utama dalam melaksanakan kegiatan organisasi sekolah. Untuk itu kegiatan administrasi kepegawaian setiap sekolah harus dilaksanakan dengan baik. Dalam kegiatan evaluasi diri yang berkaitan dengan aspek administrasi kepegawaian, maka setiap sekolah harus memiliki file/data pegawai. Skor tertinggi diberikan 100 poin akan diperoleh sekolah jika pada saat tim asesor berkunjung (*visit*) ke sekolah tersebut memiliki file/data guru tetap dan guru tidak tetap lengkap dengan pas photo dan identitas, salinan foto copy ijazah dan salinan foto copy SK pengangkatan pertama dan SK terakhir. Di samping itu juga, sekolah harus memiliki catatan waktu kenaikan pangkat/gaji, buku induk pegawai, data statistik serta DUK guru dan pegawai dalam rangka menilai kebijakan akreditasi sekolah yang akan diberikan oleh pihak BAS Kabupaten.

d) Administrasi Perlengkapan

Administrasi perlengkapan mencakup ada tidaknya buku inventaris yang mencatat perabotan yang dibeli sendiri oleh sekolah, dan diperoleh dari bantuan. Setiap ruangan juga harus memiliki daftar inventaris yang berisi data barang-barang inventaris yang ada dalam setiap ruangan. Evaluasi administrasi perlengkapan juga menilai ada tidaknya daftar buku penghapusan. Di samping itu juga, setiap barang yang dimiliki sekolah

harus memiliki nomor inventaris barang. Adanya penilaian yang dilakukan pihak BAS Kabupaten terhadap SD Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak sebesar 100 poin jika sekolah telah melakukan pemberian nomor pada setiap barang inventaris miliknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan), maka dapat diketahui bahwa nilai untuk administrasi perlengkapan sekolah yang diperoleh SD Negeri di Kecamatan Ngabang adalah sebesar 70 poin. Kenyataan ini disebabkan karena pihak sekolah tidak memiliki buku inventaris yang mencatat perabotan yang dibeli sendiri oleh sekolah, dan diperoleh dari bantuan. Di samping itu juga, pihak sekolah tidak memiliki daftar inventaris yang berisi data barang-barang inventaris yang ada dalam setiap ruangan, meskipun untuk semua barang-barang inventaris sekolah tersebut pihak sekolah telah memberikan penomoran secara berurutan sehingga menimbulkan dampak kurang baik dalam penerbitan hasil akreditasi yang berkaitan dengan kualitas lulusan peserta didik.

e) Administrasi Keuangan

Setiap Sekolah Dasar Negeri (SDN) harus memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Sekolah (RAPBS). Evaluasi administrasi keuangan ini harus dibuktikan dengan adanya RAPBS yang terdiri dari adanya rencana anggaran gaji dan honor guru, pembelian bahan pengajaran, ATK, biaya pemeliharaan, dan pengeluaran lain-lain yang tak terduga. Adapun RAPBS ini juga harus didukung dengan

pembukuan yang jelas dan transparan, seperti adanya buku pembantu dan buku kas yang diketahui kepala sekolah dan dilaporkan kepada komite sekolah dan pejabat yang berwenang. Secara keseluruhan administrasi keuangan ini memiliki skor total sebesar 100 poin.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari kepala sekolah dan Dewan Guru SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan), maka dapat diketahui bahwa untuk administrasi keuangan sekolah memperoleh nilai 50 poin dari BAS Kabupaten. Hal ini menurut Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang disebabkan oleh karena sekolah tidak memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disertai dengan administrasi keuangan yang harus dibuktikan dengan adanya RAPBS. Namun demikian, sekolah memiliki rencana anggaran gaji dan honor guru, pembelian bahan pengajaran ATK, biaya pemeliharaan, dan pengeluaran lain-lain yang tak terduga.

f) Administrasi Perpustakaan

Dalam evaluasi diri yang berkaitan dengan administrasi perpustakaan, setiap sekolah harus memiliki daftar keseluruhan buku yang dimiliki. Keberadaan daftar buku tersebut harus pula ditunjang dengan adanya katalog dan kartu buku. Disamping hal tersebut di atas, administrasi perpustakaan juga harus didukung adanya kartu dan daftar anggota, daftar peminjam, daftar penghapusan, kartu peminjaman dan daftar petugas perpustakaan. Adapun besarnya angka sub komponen administrasi perpustakaan yang diberikan pihak BAS Kabupaten ini

sebesar 100 poin, yang artinya dukungan administrasi perpustakaan di SD Negeri dinyatakan lengkap.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan), bahwa untuk administrasi perpustakaan ini SD Negeri di Kecamatan Ngabang memperoleh nilai 100, karena semua kriteria untuk administrasi perpustakaan yang telah dipersyaratkan oleh BAS sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi oleh pihak sekolah.

g) Administrasi Guru

Administrasi guru mencakup evaluasi terhadap perencanaan keperluan akan tenaga guru, uraian tugas guru, tenaga lainnya, serta petunjuk pelaksanaannya. Di samping itu juga, setiap sekolah harus memiliki daftar mutasi guru dan tenaga lainnya, serta buku laporan mutasi guru dan kenaikan pangkatnya. Adapun skor tertinggi yang diberikan oleh sub komponen administrasi guru ini sebesar 100 poin oleh pihak BAS Kabupaten.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan), bahwa untuk administrasi guru ini SD Negeri di Kecamatan Ngabang memperoleh nilai 50, karena meskipun sekolah memiliki daftar mutasi guru dan tenaga lainnya, serta buku laporan mutasi guru dan kenaikan pangkatnya, serta perencanaan keperluan akan tenaga guru, uraian tugas guru, tenaga lainnya, serta petunjuk pelaksanaannya.

h) Administrasi Siswa

Pada umumnya setiap SD yang akan mengajukan akreditasi harus dilihat juga aspek administrasi siswanya. Untuk itu, sekolah yang bersangkutan harus memiliki buku induk yang memuat identitas siswa, data orang tua/wali, data STTB, nilai siswa dan foto siswa. Disamping itu, sekolah yang harus memiliki daftar calon siswa daftar STTB beserta copy STTB, buku mutasi, buku daftar kelas, buku klaper, papan daftar hadir harian siswa, daftar peserta ujian akhir sekolah, daftar piket siswa, data statistik yang berisi jumlah siswa tiap kelas, dan buku rapor siswa. Adapun faktor tertinggi yang diberikan untuk sub komponen administrasi siswa ini adalah sebesar 100 poin karena semua kriteria untuk administrasi siswa yang telah dipersyaratkan oleh BAS sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi oleh pihak sekolah.

i) Administrasi Hubungan Sekolah

Dalam penyelenggaraan suatu lembaga pendidikan formal tidak terlepas dari adanya hubungan sekolah dengan masyarakat. Adapun setiap SD yang akan mengajukan akreditasi idealnya harus memiliki catatan BP3 atau Komite Sekolah, catatan kerja sama dengan instansi lain serta memiliki organisasi BP3 atau Komite Sekolah. Adapun jumlah sub komponen administrasi hubungan sekolah ini dinilai sebesar 100 poin.

Di samping itu, dalam kaitannya dengan manajemen sekolah dasar, maka setiap SD harus mampu melaksanakan manajemen yang berbasis sekolah. Manajemen sekolah harus dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh melalui penerapan konsep kemandirian, kemitraan, partisipasi, semangat kebersamaan, bertanggung jawab, keterbukaan (transparansi), keluwesan, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Manajemen sekolah pada SD secara umum harus ditunjukkan dengan adanya penerapan kepemimpinan oleh kepala sekolah yang bersikap terbuka. Kepala sekolah senantiasa memberikan pendelegasian tugas dengan baik. Para guru dan tenaga lainnya diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Kepemimpinan kepala sekolah yang bersikap terbuka akan membawa sekolah kepada upaya transparansi dan mengurangi rasa egoistis serta kepemimpinan yang otoriter.

Sebagai langkah akhir dalam penyelenggaraan manajemen sekolah pada SD maka pengawasan mutlak untuk diperlukan. Kepala sekolah harus melaksanakan pengawasan secara berkala, dengan suatu standar kinerja kegiatan sekolah dapat terdokumenkan dengan baik melalui kegiatan administrasi sekolah. Administrasi sekolah berperan dalam mendukung kegiatan pokok proses pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan), maka dapat diketahui bahwa untuk administrasi sekolah di SD Negeri di Kecamatan Ngabang memperoleh nilai 65. Penilaian tersebut berdasar pada pengajuan akreditasi dengan memiliki catatan BP3 / Komite sekolah, catatan kerja sama dengan instansi lain serta memiliki organisasi BP3 atau Komite Sekolah. Di samping itu juga, perolehan nilai tersebut sebagai akibat dari

pelaksanaan manajemen sekolah yang tidak konsisten melalui penerapan konsep kemandirian, kemitraan, partisipasi, semangat kebersamaan, bertanggung jawab, keterbukaan (transparansi), keluwesan, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Diperoleh informasi bahwa SD Negeri di Kecamatan Ngabang juga telah menetapkan perencanaan sekolah melalui penyusunan visi, misi serta tujuan dari penyelenggaraan pendidikan sekolah. Jika dilihat dari visi, misi dan tujuan dari SD Negeri di Kecamatan Ngabang, maka dapatlah diketahui bahwa SD Negeri di Kecamatan Ngabang memiliki visi, misi dan tujuan yang hampir sama dengan SD Negeri lainnya, yakni bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas. Adapun visi, misi dan tujuan dari SD Negeri di Kecamatan Ngabang ini telah tertera dengan baik melalui bagan-bagan yang ada di ruangan kepala sekolah dan ruangan guru. Hal ini bertujuan agar setiap warga sekolah dapat mengetahui arah dan tujuan yang akan dicapai oleh sekolah dalam mencapai tujuan proses pembelajarannya. Dalam pada itu, manajemen sekolah pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang juga telah dilaksanakan dengan baik.

3. Organisasi dan Kelembagaan

Pada umumnya, dalam kebijakan dan pedoman akreditasi sekolah yang telah dikeluarkan oleh BASNAS Depdiknas (2004) ditentukan bahwa untuk penilaian organisasi/kelembagaan sekolah harus memiliki organisasi

dan pembagian kerja yang dinamis sesuai dengan arah dan tujuan sekolah serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sekolah harus memiliki dokumen legal dan persyaratan kelembagaan sesuai peraturan yang berlaku, serta memiliki peraturan dan tata tertib sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Program sekolah akan berjalan lancar, terorganisasi, terintegrasi, terkoordinasi secara konsisten jika didukung oleh organisasi sekolah yang cepat tanggap terhadap kebutuhan sekolah. Sekolah diorganisasikan secara tersistem sehingga memiliki struktur hirarkis yang terkoordinir secara rapi untuk melaksanakan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah.

Sehubungan dengan hal itu, maka untuk melaksanakan visi, misi dan tujuan dari sekolah tersebut, pada dasarnya diperlukan suatu wadah organisasi yang dapat menaunginya. Pada organisasi sekolah khususnya pada SD harus tergambar secara jelas pembagian kerja dari setiap pelaksana mulai dari kepala sekolah hingga tenaga pelaksana yang terendah. Di samping pembagian kerja organisasi juga harus dilengkapi dengan adanya uraian tugas yang jelas. Adapun hal ini dimaksudkan agar setiap pelaksana manajemen sekolah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan) bahwa untuk organisasi kelembagaan ini SD Negeri di Kecamatan Ngabang memperoleh nilai 70 poin dari BAS karena SD Negeri di Kecamatan Ngabang telah memiliki struktur organisasi yang jelas dan uraian tugas yang tersusun dengan rinci dan jelas, misalnya pembagian tugas yang dinamis sesuai dengan arah dan tujuan

sekolah serta ketentuan yang berlaku. Uraian tugas yang dibuat tersebut sangat membantu mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya, organisasi kelembagaan SD Negeri di Kecamatan Ngabang yang telah berjalan dengan baik.

4. Sarana dan prasarana Sekolah

Salah satu aspek yang sangat penting untuk dievaluasi dalam pengajuan akreditasi pada setiap Sekolah Dasar (SD), adalah tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut dapat mendukung tercapainya misi, visi dan tujuan sekolah. Perkembangan dalam proses belajar mengajar dalam rangka untuk mencerdaskan siswa di sekolah sangat tergantung bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah (seperti buku paket, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain) dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan satuan pelajaran yang telah dibuat hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika didukung oleh sarana dan prasarana sekolah yang memadai.

Secara umum penilaian terhadap aspek sarana dan prasarana oleh pihak BAS, yakni sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan tercapainya tujuan sekolah dan tuntutan pedagogik yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dan memberdayakan sesuai tuntutan karakteristik mata pelajaran, pertumbuhan dan perkembangan afektif, kognitif, psikomotor peserta didik.

Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi gedung, ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, pusat sumber pembelajaran, ruang praktek, media pembelajaran, bahan/material, sarana pendidikan jasmani dan olah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan rekreasi, fasilitas kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik dan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan), maka dapat diketahui bahwa untuk sarana dan prasarana sekolah SD Negeri di Kecamatan Ngabang memperoleh nilai 60 poin dari BAS. Menurut kepala sekolah bahwa nilai 60 ini diberikan oleh pihak BAS, disebabkan oleh karena masih banyaknya sarana dan prasarana yang belum dimiliki oleh sekolah. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah masih kurang lengkap dan kurang memadai untuk menunjang proses pembelajaran.

Sarana dan prasarana yang umumnya dimiliki SD Negeri di Kecamatan Ngabang yang masih kurang lengkap yakni antara lain : alat peraga, seperti anatomi tubuh manusia, dan peralatan lainnya yang terdapat di laboratorium, ruang keterampilan, koperasi sekolah, dan gudang. Di samping itu juga, sarana pendidikan jasmani dan olah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan rekreasi, dan sarana serta prasarana lain sesuai tuntutan program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah juga kurang memadai. Sedangkan di luar dari sarana dan prasarana yang telah

disebutkan sebagaimana tersebut diatas, SD Negeri di Kecamatan Ngabang telah memilikinya.

5. Ketenagaan

Untuk dapat terselenggaranya kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) tidak terlepas dari tersedianya aspek ketenagaan. Tenaga kependidikan sekolah adalah mereka yang berkualifikasi sebagai pendidik dan pengelola pendidikan. Pendidik bertugas merencanakan, melaksanakan, dan menilai serta mengembangkan proses pembelajaran. Tenaga kependidikan meliputi, guru, konselor, kepala sekolah dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.

Penilaian tentang aspek ketenagaan di SD dimulai dari evaluasi terhadap kepala sekolah. Adapun butir komponen yang dievaluasi terhadap kepala sekolah meliputi Ijazah atau pendidikan terakhir, status kepala sekolah yakni apakah sebagai kepala sekolah tetap, kepala sekolah tidak tetap, apakah memiliki jabatan rangkap atau tidak. Selain itu, pengalaman menjadi kepala sekolah juga menjadi komponen evaluasi, mengadakan rapat dengan guru, serta mampu memberikan pemahaman kurikulum dan teknis penjabaran persiapan pengajaran.

Khusus untuk tenaga pengajar / guru di SD, maka mereka harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan disiplin ilmu yang diajarkan. Adapun kompetensi dan kualifikasi yang sesuai akan berdampak positif pada profesionalisme bagi tenaga pengajar tersebut. Sedangkan aspek

yang dievaluasi terhadap tenaga pengajar/guru, yakni meliputi : jumlah tenaga pengajar, latar belakang pendidikan, status guru apakah sebagai guru tetap atau guru tetap, pengalaman mengajar guru, baik di SD yang bersangkutan maupun di tempat lain. Disiplin waktu mengajar dan kehadiran guru juga menjadi aspek yang akan dievaluasi. Aspek terakhir yang dievaluasi dari ketenagaan ini adalah tenaga non guru. Setiap SD sebaiknya mempunyai tenaga tata usaha, penjaga sekolah, tenaga perpustakaan, tukang kebun dan tenaga keamanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan kepala sekolah SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan), maka dapat diketahui bahwa untuk ketenagaan (tenaga pendidik) sekolah ini SD Negeri di Kecamatan Ngabang memperoleh nilai 70 poin dari BAS. Menurut pengakuan Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang, kenyataan ini disebabkan oleh sebagian besar tenaga pendidik (guru) belum memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1). Sedangkan sisanya tenaga pengajar berpendidikan Diploma Dua (D2) Kependidikan, dan berpendidikan SPG atau sederajat. Selain itu, tenaga guru yang mengajar di SD Negeri di Kecamatan Ngabang sebagian besar telah berpengalaman mengajar minimal 5 tahun ke atas.

6. Pembiayaan dan Pendanaan

Pada umumnya setiap Sekolah Dasar (SD) harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang baik dan bermutu, mutlak memerlukan adanya dana yang cukup dan

berkelanjutan. Dalam kriteria penilaian pembiayaan dan pendanaan, umumnya setiap SD dipersyaratkan harus melaksanakan penghimpunan dana secara transparan dan jelas. Prinsip manajemen berbasis sekolah harus diterapkan sebaik mungkin. Di samping itu, penggunaan dana-dana yang ada harus teralokasikan dengan baik, terserap secara merata, dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang, maka dapat diketahui bahwa penilain untuk pembiayaan dan pendanaan, SD Negeri di Kecamatan Ngabang memperoleh nilai sebesar 70 poin dari BAS. Adapun nilai yang diperoleh SD Negeri di Kecamatan dari pihak BAS ini, menurut kepala sekolah adalah karena pembiayaan dan pendanaan sekolah pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni dana penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah SD Negeri di Kecamatan Ngabang terdiri dari : subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat dan orang tua peserta didik, dan sumbangan lainnya. Meskipun penggunaan dan pelaporan dana-dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara transparan, namun kenyataannya dalam pengalokasian dana pendidikan tersebut, sekolah tidak berpedoman pada prinsip keadilan pemerataan yang merupakan kriteria penilaian dari pihak BAS. Kenyataan ini terlihat dari adanya laporan penggunaan dana yang dibuat oleh pihak sekolah yang pendistribusiannya tidak sesuai dengan peruntukannya, khususnya dalam bidang pendidikan.

Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya proses pembelajaran pada satuan pendidikan

tertentu. Peserta didik merupakan salah satu masukan yang sangat menentukan bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Namun demikian prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik pada dasarnya merupakan upaya kolektif antara peserta didik dan guru.

7. Peserta Didik

Pada umumnya kriteria penilaian terhadap peserta didik, terdapat 2 (dua) aspek pokok yang harus diperhatikan. Kedua aspek pokok tersebut antara lain, bagaimana penerimaan dan pengembangan peserta didik dan keluaran peserta didik sebagai proses akhir dari pendidikan di sekolah. Adapun setiap SD harus menerima peserta didik melalui proses yang transparan dengan berdasarkan pada Nilai Evaluasi Murni (NEM) dari siswa yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan), maka dapat diketahui bahwa untuk kriteria peserta didik ini Sekolah SD Negeri di Kecamatan Ngabang memperoleh nilai 40 poin dari BAS. Menurut pengakuan Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang, kenyataan ini disebabkan oleh karena penerimaan siswa baru pada Sekolah SD Negeri di Kecamatan Ngabang, tidak begitu ketat dalam melakukan seleksi penerimaan siswa baru berdasarkan dengan NEM. Dalam arti, bahwa siswa yang memiliki NEM relatif rendahpun dapat masuk sekolah SD negeri di Kecamatan Ngabang sepanjang kursi untuk

calon kelas I (satu) yang terdapat di sekolah itu masih tersedia. Calon siswa cukup mengisi formulir dan membayar uang pendaftaran.

Selanjutnya berdasarkan informasi lain yang penulis peroleh di lapangan, maka dapat diketahui bahwa pada saat peserta didik telah diterima di SD Negeri di Kecamatan Ngabang, pihak sekolah mengarahkan setiap peserta didik untuk mengembangkan diri dalam program-program sekolah. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat mengikuti program pendidikan dengan baik dan tanpa diskriminasi. Mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama untuk mendapatkan materi pembelajaran. Proses pembelajaran ini juga harus memiliki komponen-komponen evaluasi untuk mengukur sampai sejauhmana kemajuan dari peserta didik.

Pada tahap akhir proses pendidikan di SD Negeri di Kecamatan Ngabang, setiap akhir tahun pelajaran sekolah akan menghasilkan keluaran (lulusan). Lulusan berkaitan dengan komponen akreditasi sekolah yang meliputi aspek prestasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik dapat dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh, baik nilai rapor maupun nilai ujian akhir nasional (UAN) dan ujian akhir sekolah (UAS). Sedangkan prestasi non akademik meliputi berbagai macam kegiatan, yakni kegiatan olah raga, kesenian, keagamaan, keterampilan kejuruan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh di lapangan, ternyata keluaran (kelulusan) peserta didik dari Sekolah SD Negeri di Kecamatan Ngabang baik secara akademik maupun non-akademik dapat membanggakan pihak sekolah dan keluarga dari peserta didik yang bersangkutan, yakni selain

keluaran peserta didik memiliki nilai rata-rata UAN dan UAS yang relatif baik, juga mereka umumnya mampu bersaing untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar Kalbar.

8. Peran Serta Masyarakat

Sekolah mengajarkan peserta didik tentang kecakapan yang diperlukan untuk menjalani hidup dan kehidupan dimasyarakat tingkat lokal, nasional, dan internasional. Apa yang diajarkan di sekolah relevan dengan tuntutan-tuntutan nilai luhur dan harapan-harapan masyarakat. Sekolah berperan serta dalam membangun masyarakat di sekitarnya. Di pihak lain, sekolah juga mendapat dukungan masyarakat di sekitarnya. Dukungan dari masyarakat itu dapat berupa dukungan materi maupun non materil. Oleh karenanya, masyarakat dapat dijadikan mitra untuk mencapai visi, misi dan tujuan sekolah. Selain itu masyarakat juga dapat dijadikan alat kontrol (pengawasan) bagi pihak sekolah. Keterlibatan masyarakat sebagai mitra sekolah dapat menjadikan masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah.

Berkaitan dengan evaluasi diri, kriteria penilaian untuk peran serta masyarakat ini dapat di ukur dari seberapa besar dukungan masyarakat, baik perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan yang dimiliki oleh sekolah. Baik dukungan finansial, dukungan kerja sama, dan lain sebagainya. Masyarakat juga

diharapkan dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, mengawasi penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan), maka dapat diketahui bahwa untuk kriteria peran serta masyarakat ini, SD Negeri di Kecamatan Ngabang memperoleh nilai 50 poin dari BAS. Menurut informasi yang penulis peroleh di lapangan, kenyataan ini disebabkan oleh karena peran serta masyarakat tidak dijadikan mitra untuk mencapai visi, misi dan tujuan sekolah. Selain itu masyarakat juga tidak dijadikan alat kontrol (pengawasan) bagi pihak sekolah, apalagi untuk melibatkan peran serta masyarakat sebagai sumber, pelaksana, dan pengendalian mutu pendidikan sekolah. Kenyataan ini dibenarkan pula oleh tokoh masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat (informan), maka dapat diketahui bahwa peran serta masyarakat terhadap lembaga pendidikan SD Negeri di Kecamatan Ngabang selama ini adalah hanya sebatas dukungan material atau finansial saja. Meskipun di SD Negeri di Kecamatan Ngabang terdapat Komite Sekolah yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk berperan serta melakukan pengawasan (kontrol) terhadap implementasi kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah, dan juga sebagai mitra bagi sekolah dalam meningkatkan mutu/kualitas pendidikan sekolah, namun kenyataannya komite sekolah tersebut tidak begitu banyak dilibatkan sekolah.

9. Lingkungan/Kultur Sekolah

Sekolah berada dalam lingkungan yang dinamis yang mempengaruhi penyelenggaraan sekolah. Sekolah menginternalisasikan lingkungan ke dalam penyelenggaraan sekolah dan menempatkan sekolah sebagai bagian dari lingkungan. Lingkungan yang diinternalisasikan dalam penyelenggaraan sekolah dapat berupa: tuntutan pengembangan diri dan peluang masa depan lulusan, dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan, kebijakan pendidikan, landasan hukum dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai dan harapan masyarakat terhadap pendidikan, tuntutan otonomi, dan tuntutan globalisasi.

Dalam kaitannya dengan komponen evaluasi diri dalam pengajuan akreditasi sekolah pada sekolah dasar (SD), maka ukuran penilaian untuk lingkungan dan kultur sekolah dapat dilihat dari bagaimana sekolah menyikapi dinamika lingkungan baik di dalam dan di luar sekolah yang terus berkembang dan berubah. Di samping itu, sekolah juga harus memiliki budaya disiplin tinggi, untuk itu diperlukan aturan dan tata tertib yang jelas. Tata tertib ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar terwujud lingkungan dan budaya sekolah yang tertib.

Berkaitan dengan lingkungan SD Negeri di Kecamatan Ngabang, maka aspek yang paling pertama untuk dilakukan evaluasi adalah keamanan sekolah. Aspek keamanan sekolah tersebut mencakup ada tidaknya pagar sekolah dan kalau ada pagar, apakah pagar tersebut terkunci, dan memiliki lampu penerangan yang masih berfungsi. Lingkungan sekolah juga dapat

dilihat dari aspek kebersihan sekolah, misalnya SD Negeri tersebut memiliki sumber air bersih yang baik, memiliki tempat sampah dan peralatan kebersihan dengan jumlah dan jenis yang memadai. Selain itu lingkungan sekolah juga harus ditunjang dengan pembuangan air limbah yang memadai, ketertiban dan keindahan/kerindangan, pelaksanaan tata tertib secara benar, serta melaksanakan kegiatan penghijauan sebagai tanaman peneduh dan tanaman hias.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan) bahwa lingkungan/kultur SD Negeri di Kecamatan Ngabang memperoleh nilai 45 dari BAS Kabupaten. Hasil penilaian tersebut dikarenakan SD Negeri yang dijadikan sampel terletak di pinggir jalan raya yang pada dengan lalu lintas kendaraan sehingga terkesan kurang aman dan tenang.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa relatif rendahnya nilai akreditasi (nilai C) yang diperoleh SD Negeri di Kecamatan Ngabang disebabkan sembilan aspek evaluasi diri yang dilakukan oleh pihak SD Negeri belum dilaksanakan dengan baidi sana-sini. Aspek evaluasi diri yang dilaksanakan sekolah merupakan dasar kriteria penilaian bagi pihak BAS Propinsi Kalimantan Barat.

B. Kinerja Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngabang

SD Negeri di Kecamatan Ngabang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang harus mampu menunjukkan kinerjanya terutama dalam memberikan pelayanan publik di bidang pendidikan kepada masyarakat. Adanya kinerja yang baik adalah salah satu ukuran organisasi yang baik atau berhasil. Dalam hal ini akan dikemukakan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian lapangan. Berikut ini akan dikemukakan hasil analisis terhadap beberapa indikator yang berpengaruh dalam kinerja Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang (aparatur birokrasi) dalam memberikan pelayanan administrasi kepada warga sekolah, yakni antara lain: akuntabilitas, responsivitas, efisiensi, orientasi terhadap pelayanan, dan fasilitas pelayanan.

Kegiatan suatu organisasi yang sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat, maka kegiatan tersebut bisa dikatakan akuntabel, apalagi kegiatan tersebut dapat mendorong kreatifitas dalam memberikan pelayanan publik. Perkembangan birokrasi pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang dalam alam yang lebih demokratis, akuntabilitas menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Suatu pekerjaan harus dijalankan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi sekolah. Sekolah SD Negeri di Kecamatan Ngabang sebagai aparat birokrasi yang memiliki kekuasaan penuh atas SD Negeri Ngabang di Kecamatan Ngabang dalam melaksanakan kebijakan akreditasi sekolah harus mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang bersifat eksternal dari pihak yang menjalankan tugas kepada pihak lain yang mempunyai kuasa dan

memberikan otoritas. Pendapat tersebut berarti bahwa kepala sekolah pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang selaku aparat birokrasi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pimpinan (Manajer) Administrasi dan Supervisor sekolah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya seharusnya bertanggung jawab kepada warga sekolah yang dibimbing dan dibinanya itu. Namun demikian, pada prakteknya hal itu sangat sulit dilakukan karena aparat birokrasi memahami pertanggungjawaban itu hanya kepada atasannya langsung.

Pada umumnya Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang sebagai aparat birokrasi yang berfungsi sebagai Pimpinan (manajer Administrasi dan Supervisor sekolah yang memiliki kekuasaan tertinggi pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang, mempunyai tugas memberikan pelayanan penyelenggaraan administrasi kepada warga sekolah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Ngabang selaku atasannya langsung. Sedangkan dalam hal peningkatan kualitas sekolah dan warga sekolah tidak bertanggung jawab secara penuh. Kenyataan ini seperti diungkapkan oleh seorang informan sekolah di Kecamatan Ngabang berinisial Ys (35 th), yakni sebagai berikut :

“Saya adalah guru tetap SD Negeri di Kecamatan Ngabang, sudah hampir sepuluh tahun lamanya saya mengajar di sekolah ini, tapi sampai sekarang kualitas sekolah dan kualitas siswa di sini tidak ada peningkatan yang berarti. Jadi tidak mengherankan jika akreditasi sekolah ini nilainya dapat C. Karena kepala sekolah yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya dalam upaya meningkatkan kualitas siswanya. Adapun tanggung jawab peningkatan kualitas siswa dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah diserahkan sepenuhnya kepada guru yang mengajar di SD Negeri di Kecamatan Ngabang” (Wawancara, 3 Maret 2009).

Berdasarkan pengakuan dari informan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang kepada warga sekolah, hanya sebatas pada tanggung jawab dalam hal prosedur penerimaan siswa baru dan penetapan biaya administrasi saja, tidak pada tanggung jawab pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas siswanya. Tidak mengherankan, jika dari 98 orang siswa SD Negeri di Kecamatan Ngabang yang mengikuti Ujian Akhir Nasional dan Ujian sekolah pada tahun 2008 memperoleh rata-rata nilai kelulusannya tidak begitu memuaskan.

Relatif rendahnya nilai rata-rata yang diperoleh para siswa SD Negeri di Kecamatan Ngabang tersebut, menggambarkan bahwa kualitas siswa SD Negeri di Kecamatan Ngabang masih belum memadai (di bawah nilai 6). Adapun kondisi ini selain berkaitan erat dengan lemahnya sistem proses belajar mengajar yang diterapkan oleh pihak sekolah, seperti misalnya guru hanya memberikan catatan kepada murid, dan murid tidak diberikan kesempatan untuk bertanya, di samping itu kurangnya tanggung jawab (akuntabilitas) kepala sekolah selaku aparat birokrasi SD Negeri di Kecamatan Ngabang terhadap peningkatan kualitas siswa (peserta didik) dan sekolahnya.

Akuntabilitas kepala sekolah selaku aparat birokrasi SD Negeri di Kecamatan Ngabang dalam penelitian ini dilihat melalui konsistensi kebijakan yang telah dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak yang sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat, dan kemampuan aparat birokrasi dalam merealisasikan kebijakan yang telah dibuat tersebut, serta acuan pelayanan

publik pada warga sekolah yang dipergunakan aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugas.

Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang untuk mengetahui kehendak dan aspirasi warga sekolahnya secara akurat. Berbagai keluhan yang disampaikan warga sekolah melalui saluran yang tersedia hanya terbatas pada ketidakpuasan warga sekolah terhadap kurangnya perhatian kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas para siswa. Adapun kehendak warga sekolah yang selama ini berhubungan dengan peningkatan kualitas siswa tidak begitu mendapat tanggapan dari kepala sekolah, misalnya bagaimana pola peningkatan kualitas siswa dalam proses pembelajaran, dan hal-hal penting lain yang diharapkan dalam beberapa tahun kedepan. Jika kehendak warga sekolah tidak mendapatkan tanggapan dengan baik oleh kepala sekolah, maka kebijakan yang dibuat sulit diharapkan untuk konsisten dengan aspirasi warga sekolah apalagi implementasi kebijakannya.

Pelaksanaan kegiatan atau program kerja yang dilakukan Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang tidak sesuai dengan aspirasi warga sekolah, dikemukakan oleh seorang staf administrasi SD Negeri di Kecamatan Ngabang dalam wawancara sebagai berikut:

“Selama ini penentuan program kerja atau prioritas pekerjaan yang menyangkut penyelenggaraan administrasi sekolah ataupun supervisor cenderung tidak melibatkan warga sekolah. Memang pada awalnya warga sekolah dilibatkan dalam forum musyawarah, tetapi itu hanya sebatas menampung aspirasi warga sekolah saja, sedangkan untuk realisasi program kerja itu sendiri warga sekolah jarang ada yang dilibatkan karena alasan keterbatasan dana dan alasan lain sebagainya dari pemerintah” (Wawancara, 12 Maret 2009).

Kemampuan aparat birokrasi merealisasikan kebijakan organisasi seharusnya sudah dapat terdeteksi dari ketidakmampuan dalam menyusun program kerja atau kegiatan yang dapat dilakukan selama setahun. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam menentukan prioritas kegiatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengenali kebutuhan warga sekolah. Kelemahan itu tidak terletak pada staf pelaksana di tingkat bawah dan menengah yakni staf administrasi dan para guru. Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang hanya mau untuk melaksanakan program kerja apabila sesuai dengan arahan atau perintah dari kepala sekolah secara langsung.

Dasar acuan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dapat menunjukkan apakah suatu pekerjaan akuntabel yang rendah karena tidak memperhatikan kepentingan atau norma-norma yang ada pada warga sekolah. Sebaliknya kegiatan yang mengacu kepada norma-norma atau kepentingan warga maka kegiatan tersebut dikatakan akuntabel.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aparat birokrasi pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang dalam melakukan pekerjaan memberikan pelayanan kepada warga sekolah hanya berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dan berlaku selama ini. Selain itu, aparat birokrasi juga semata-mata hanya berpatokan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan mereka, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. Adapun dengan pelaksanaan tugas seperti itu. Akuntabilitas aparat birokrasi dalam pemberian pelayanan publik kepada warga sekolah sangat rendah,

karena hanya berpedoman kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak dan tidak berani mengambil resiko dalam melaksanakan pekerjaannya.

Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena responsivitas merupakan kemampuan aparat birokrasi pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang untuk mengenali kebutuhan warga sekolah dan juga memiliki kemampuan untuk merespon atau peka terhadap apa yang menjadi tuntutan warga sekolah. Dengan adanya kemampuan tersebut maka akan tercipta suatu keselarasan antara SD Negeri di Kecamatan Ngabang dengan warga sekolahnya. Terciptanya keselarasan antara aparat birokrasi dengan warga sekolah yang akan memuaskan kedua belah pihak maka dari sini dapat dikatakan kinerja organisasi tersebut menjadi baik.

Aspek responsivitas dapat dilihat dari adanya saluran komunikasi bagi warga sekolah untuk menyampaikan aspirasi atau kebutuhannya kepada Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang. Saluran komunikasi ini sangat diperlukan bagi warga sekolah agar mereka dapat menyalurkan aspirasi atau kebutuhan yang diharapkan, sedangkan bagi lembaga pendidikan yakni SD Negeri di Kecamatan Ngabang merupakan sarana untuk menerima saran, kritik dan keluhan warga sekolah sebagaimana yang disampaikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Landak dalam suatu wawancara dengan peneliti, yakni:

“Di dalam menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan kepada warga sekolah tentunya kami sebagai aparat birokrasi kecamatan harus dan selalu menerima kritikan, saran dan keluhan-keluhan dari warga sekolah. Untuk itulah, kami selalu membuka diri terhadap kebutuhan dan aspirasi warga sekolah baik itu saat jam dinas maupun di luar jam dinas. Saat jam dinas, kantor selalu terbuka bagi warga sekolah. Begitu juga dengan di luar jam dinas, kami pun selalu membuka pintu rumah kami untuk warga sekolah

yang menyampaikan aspirasinya. Perlu diketahui bahwa warga sekolah SD Negeri di Kecamatan Ngabang itu selalu menyampaikan aspirasinya pada saat adanya pertemuan-pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, dan tak jarang pula mereka menyampaikannya langsung kepada aparat birokrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Landak baik di kantor maupun di rumah sebagaimana yang saya sebutkan tadi” (Wawancara, 15 Maret 2009).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Landak melalui aparat birokrasinya selalu membuka diri terhadap berbagai aspirasi warga sekolah SD Negeri di Kecamatan Ngabang baik berupa keluhan, saran maupun kritikan. Pada sisi lain, pelayanan sekolah pada warganya belum memuaskan. Berdasarkan informasi dari orang tua atau wali siswa, warga sekolah merasa segan, bahkan takut, untuk menyampaikan aspirasinya kepada Kepala SD Negeri Kecamatan Ngabang karena sikap kepala sekolah yang arogan. Namun demikian, pihak sekolah selalu merespon tuntutan warga sekolah untuk meningkatkan kualitas siswa. Hal ini terungkap pada wawancara peneliti dengan Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang, seperti berikut ini:

“Segala tuntutan dan kebutuhan warga sekolah akan kami tampung dan selanjutnya diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk program kerja. Adapun salah satu bentuk program kerja yang telah kami laksanakan adalah memasukkan kurikulum nasional ke dalam setiap mata pelajaran. Kami mempunyai atasan yakni Kepala Dinas Pendidikan di mana beliau lah yang mengambil keputusan. Hampir semua masukan dan usulan dari warga sekolah pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang dapat respon positif dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak selaku pimpinan kami” (Wawancara, 21 Maret 2009).

Berdasarkan ungkapan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa harapan warga sekolah yang menginginkan tindak lanjut dari tuntutan dan kebutuhannya dalam upaya peningkatan kualitas siswa telah dilakukan oleh Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang. Hal ini terbukti dengan

adanya upaya kepala sekolah memasukkan kurikulum nasional ke dalam setiap mata pelajaran demi untuk meningkatkan kualitas SD Negeri di Kecamatan Ngabang dan kuantitas siswanya.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang dari aspek responsivitas dapat dikatakan baik, karena warga sekolah merasa adanya saluran komunikasi yang disediakan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk menyampaikan aspirasinya. Selain itu, adanya kemampuan yang dimiliki aparat birokrasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk mengenali apa yang menjadi keinginan warga sekolah melalui interaksi langsung dengan mereka, menyebabkan apa yang menjadi tuntutan dan keinginan warga sekolah dituangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Landak dalam bentuk program kerja yang kemudian mendapatkan respon positif dari Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang.

Efisiensi diartikan sebagai penghematan waktu dan biaya dalam rangka penyelenggaraan evaluasi diri yang dilakukan oleh kepala sekolah dan para guru SD Negeri di Kecamatan Ngabang. Kinerja kepala sekolah dan para guru SD Negeri di Kecamatan Ngabang dari aspek efisiensi yang menyangkut waktu dan biaya untuk evaluasi diri dalam rangka mengajukan akreditasi sekolah dapat dilihat dari tanggapan guru SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan) yang menyatakan bahwa sebelum kebijakan akreditasi sekolah dilaksanakan oleh BAS Propinsi Kalimantan Barat pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang, maka kinerja para guru sangat baik, demikian pula halnya dengan biaya pengeluaran dalam

rangka akreditasi sekolah sangat hemat dan transparan sekali, dalam arti hanya untuk keperluan sekolah yang penting saja yang diberikan biaya dan dicatat dalam suatu pembukuan.

Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang memang belum menetapkan standar waktu dan biaya dalam rangka pelaksanaan akreditasi sekolah. Hal ini terungkap dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan), yakni sebagai berikut :

“Untuk memberikan pelayanan administrasi kepada warga sekolah, kami akan berusaha semaksimal mungkin memuaskan mereka. Termasuk salah satunya memberikan pelayanan administrasi kepada warga sekolah yang tepat waktu. Pihak sekolah tidak pernah menetapkan waktu kapan suatu pelayanan administrasi tersebut dapat selesai. Biasanya kami selalu cepat menyelesaikan suatu urusan terutama dalam pelaksanaan evaluasi diri dalam rangka akreditasi sekolah, namun terkadang ada kendala jika kami atau bawahan kami yang berwenang dalam urusan tersebut tidak berada di tempat. Berkaitan dengan kendala tersebut, warga sekolah biasanya dapat memakluminya. Itulah yang terjadi di SD Negeri di Kecamatan Ngabang ini, kami akan selalu cepat menyelesaikan pelayanan administrasi sekolah jika tidak ada kendala yang berarti” (Wawancara, 25 Maret 2009).

Dari wawancara tersebut dapat diartikan bahwa Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang telah melakukan upaya untuk menyelesaikan suatu urusan secepat mungkin dan menyediakan waktu untuk itu, terutama dalam memberikan pelayanan administrasi sekolah yang tepat waktu, meskipun untuk pelayanan administrasi kepada warga sekolah tersebut tidak pernah ditetapkan kapan waktu pelayanan administrasi itu selesai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala sekolah dan para guru SD Negeri di Kecamatan Ngabang dari aspek efisiensi biaya dapat dikatakan baik karena warga sekolah dapat mengetahui biaya

meskipun masih ada biaya tertentu yang harus dijelaskan dengan baik. Sedangkan, dalam hal waktu penyelesaian urusan belum dikatakan baik karena kepala sekolah belum memberikan kepastian waktu atau lamanya penyelesaian pelayanan administrasi kepada warga sekolah walaupun pihak sekolah dan para guru SD Negeri di Kecamatan Ngabang telah menyatakan sikapnya kepada warga sekolah bahwa mereka akan memberikan pelayanan administrasi yang terbaik, namun dalam prakteknya hal itu belum terealisasi dengan baik.

Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang selaku aparat birokrasi yang melayani warga sekolah harus memiliki orientasi terhadap pelayanan agar disaat warga sekolah memerlukan pelayanan administrasi, mereka telah siap untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan warga sekolah. Orientasi terhadap pelayanan sebenarnya menunjuk pada ukuran seberapa besar sumber daya yang dimiliki oleh kepala sekolah digunakan untuk melayani pengguna pelayanan (warga sekolah).

Kepala sekolah yang tidak memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan pokoknya memberikan pelayanan kepada warga sekolahnya, maka kinerjanya akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena untuk melayani kebutuhan warga sekolah diperlukan konsentrasi maksimal dari kepala sekolah agar pelaksanaan pekerjaannya dilakukan dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab.

Berkaitan dengan aspek orientasi terhadap pelayanan, berikut kutipan hasil wawancara penulis dengan Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang.

“Saya ini adalah Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang, dan mengabdikan di sekolah ini kurang lebih 15 tahun. Saya dan keluarga hidup dari gaji sebagai Pegawai Negeri, dan berapalah gaji pegawai negeri tersebut, anda kan tahu sendiri. Meskipun ada tunjangan jabatan sebagai kepala sekolah, namun hanya pas-pasan untuk hidup sebulan, bahkan saya mesti mencari tambahan penghasilan lainnya. Jadi wajar sajalah kalau saya mencari tambahan lainnya di luar jam dinas. Memang tugas utama saya adalah memberikan pelayanan itu kepada warga sekolah, namun di luar jam dinas, saya memanfaatkan untuk mencari tambahan penghasilan yang terkadang cukup menyita waktu yang menyebabkan saya sampai-sampai tidak masuk kantor, terutama kalau saya pergi ke luar daerah” (Wawancara, 30 Maret 2009).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang telah berusaha untuk memberikan perhatian terhadap pelayanan administrasi terhadap warga sekolahnya, dan mereka menyadari bahwa tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai negeri sipil yakni memberikan pelayanan administrasi yang tertarik kepada warga sekolah. Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang akan selalu berusaha memberikan pelayanan kepada warga sekolah sebaik-baiknya namun dengan berbagai kesibukan di luar jam kerja rata-rata Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang mencari tambahan penghasilan, terkadang tugas pokoknya untuk memberikan pelayanan kepada warga sekolahnya terabaikan.

Mengenai kehadiran para guru dan staf administrasi di SD Negeri di Kecamatan Ngabang, Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan) mengatakan sebagai berikut :

“Jam mengajar yang kami terapkan di sekolah ini mulai pukul tujuh wiba tepat dan berakhir pada pukul satu wiba. Ini kebijakan dari kami selaku kepala sekolah, karena Kepala Dinas Pendidikan sendiri mengintruksikan mulai kerja pukul tujuh wiba tepat. Namun, dengan adanya toleransi waktu tersebut, terkadang para guru dan staf administrasi pun sering terlambat. Mereka yang sering terlambat ini akan ada teguran dari kami.

Untuk diketahui bahwa tak jarang pula yang tidak masuk kerja dengan berbagai alasan. Ada yang sakit, ijin, dan sebagainya” (Wawancara, 30 Maret 2009).

Hasil wawancara kepala sekolah di atas menunjukkan adanya keseriusan Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang untuk menerapkan disiplin kepada para guru dan staf administrasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan akreditasi sekolah. Ini dilihat dari adanya penerapan jam kerja kantor, dan bagi guru yang berhalangan harus mendapatkan izin dari pimpinan sekolah. Walaupun ada yang datang terlambat ke sekolah namun mereka akan berada di tempat kerjanya sampai jam kerja berakhir dan biasanya mereka akan mendapat teguran dari pimpinan sekolah. Selain itu, pimpinan sekolah telah mengantisipasi pekerjaan bagi mereka yang berhalangan sehingga tugas pelayanan kepada warga sekolah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Ditinjau dari aspek orientasi terhadap pelayanan maka dapat dikatakan bahwa kinerja Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang adalah baik karena adanya perhatian yang baik dari Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang di dalam memberikan pelayanan kepada warga sekolah sehingga segala sumber daya yang dimiliki SD Negeri di Kecamatan Ngabang dicurahkan kepada pemberian pelayanan. Ini terlihat dengan adanya Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang yang selalu berada di kantor untuk siap memberikan pelayanan administrasi yang diperlukan warga sekolah. Namun, dengan perilaku Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang yang cenderung arogan maka terkadang warga sekolah kurang simpatik kepada sikap dan perilaku dari individu kepala sekolah yang bersangkutan.

Para pemberi dan penerima jasa pelayanan administrasi pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang akan dapat merasa nyaman berada di lingkungan kerja apabila adanya fasilitas-fasilitas fisik pelayanan berupa ruang tunggu yang memadai, sarana informasi yang tersedia, dan peralatan-peralatan kerja yang cukup di dalam pemberian pelayanan. Fasilitas-fasilitas tersebut akan sangat mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan pelayanan administrasi terhadap warga sekolah di SD Negeri di Kecamatan Ngabang karena suatu pelayanan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak di dukung oleh fasilitas yang memadai. Ketersediaan, kesiapan, dan penggunaan fasilitas pelayanan merupakan hal penting bagi penyelenggaraan pendidikan sekolah. Namun hal yang lebih penting lagi adalah apabila fasilitas pelayanan tersebut untuk proses belajar mengajar. Secara periodik, fasilitas pelayanan sekolah perlu dievaluasi secara sistematis sesuai dengan tuntutan perkembangan sekolah.

Untuk melihat bagaimana fasilitas pelayanan administrasi yang ada di SD Negeri di Kecamatan Ngabang, hasil wawancara penulis dengan staf administrasi SD Negeri di Kecamatan Ngabang, sebagai berikut:

”Untuk memberikan pelayanan administrasi, segala fasilitas yang ada dan dimiliki sekolah ini masih kurang memadai. Bapak bisa melihatnya sendiri bahwa segala fasilitas yang ada di sini masih kurang lengkap, maklumlah pak namanya saja sekolah di kampung. Hanya saja kondisi beberapa fasilitas tersebut kurang layak dipakai seperti mesin ketik yang bisa dipakai hanya dua buah sedang yang lain rusak. Sedangkan untuk pelayanan administrasi kepada warga sekolah terdapat satu buah komputer di ruang administrasi. Dan fasilitas komputer inilah bagi kami yang membantu dalam mempermudah pelayanan administrasi kepada warga sekolah” (Wawancara, 31 Maret 2009).

Hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa segala fasilitas pelayanan administrasi sudah tersedia di SD Negeri di Kecamatan Ngabang. Namun demikian, masih terdapat juga fasilitas yang rusak yang tidak memadai untuk pemberian pelayanan kepada warga sekolah. Peralatan kerja yang tidak memadai untuk tersebut seharusnya diperbaiki agar dapat dipergunakan kembali, karena umumnya kerusakan pada peralatan kerja dapat menghambat kerja guru pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang di dalam memberikan pelayanan administrasi kepada warga sekolah.

Selain perlunya fasilitas kerja yang lengkap dan memadai, kenyamanan dalam pelayanan pun perlu diperhatikan. Kenyamanan tempat pemberi pelayanan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya seperti ruang tunggu, tempat parkir kendaraan dan toilet harus dipelihara kenyamanan dan kebersihannya sehingga membuat warga sekolah merasa nyaman saat berurusan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di SD Negeri di Kecamatan Ngabang, maka dapat diketahui bahwa ruang kantor tempat berlangsungnya pelayanan administrasi terlalu sempit. Adapun ruang pelayanan administrasi yang relatif sempit itu, tentunya membuat tempat pelayanan terasa menjadi sesak. Kondisi ruang tempat pelayanan administrasi yang sempit ini diakui oleh staf administrasi SD Negeri di Kecamatan Ngabang sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

”Memang ruang tempat pelayanan administrasi disini terlalu sempit. Warga sekolah berdesak-desakan di depan ruang pelayanan administrasi untuk mendapatkan pelayanan, apalagi pada waktu menjelang ulangan umum, ujian sekolah, dan pengurusan ijazah atau surat-surat penting

lainnya, biasanya ramai warga sekolah yang datang untuk berurusan” (Wawancara, 31 Maret 2009).

Berbeda dengan ruang tempat pelayanan administrasi yang sempit, ruang tunggu yang terdapat di depan ruang Kepala SD Negeri di kota Kecamatan Ngabang cukup baik dan bersih. Ruang tunggu tersebut adalah sebuah ruangan yang letaknya persis di depan ruangan kepala sekolah yang diberi kursi sofa. Tempat parkir yang tersedia di halaman depan SD Negeri di Kecamatan Ngabang adalah cukup baik untuk dipergunakan sehari-hari oleh warga sekolah, tetapi bila ada kegiatan yang besar, tempat parkir tersebut dapat dikatakan belum memadai. Hanya saja tempat parkir yang ada lokasinya terletak di halaman terbuka dan belum ada atapnya, sehingga kendaraan warga sekolah akan terkena panas dan basah di saat turun hujan.

Demikian juga toilet yang ada di SD Negeri di Kecamatan Ngabang kondisinya lumayan bersih. Jumlahnya ada tiga buah, yakni satu buah khusus untuk kepala sekolah dan guru, sedangkan dua buah masing-masing untuk siswa dan siswi. Air dan gayung juga tersedia sehingga memudahkan warga sekolah dan pegawai SD Negeri di Kecamatan Ngabang untuk keperluan buang air atau mencuci tangan.

Sehubungan dengan kenyamanan jika berada di SD Negeri di Kecamatan Ngabang, berikut ini hasil wawancara penulis dengan Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan) yang menyatakan:

”Dengan fasilitas yang ada di SD Negeri di Kecamatan Ngabang yang kami miliki, kami akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga sekolah. Dengan fasilitas itu pula, kami berusaha memberikan kenyamanan kerja baik bagi kami sendiri maupun warga

sekolah. Setiap guru dan staf administrasi telah memiliki meja dan kursi masing-masing, ruang tamu dengan meja dan kursinya, begitu juga dengan ruang rapat” (Wawancara, 31 Maret 2009).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa baik Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang maupun warga sekolah akan merasa nyaman jika berada di sekolah dengan fasilitas yang memadai. Demikian juga dengan SD Negeri di Kecamatan Ngabang sebagai lembaga pendidikan formal, dengan fasilitas yang telah ada membuat para guru dan staf administrasi bisa bekerja dengan baik. Kenyamanan tempat bekerja tentu akan memberikan dampak kepada mutu pelayanan yang akan diberikan warga sekolah.

Dengan demikian, maka berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun kinerja pelayanan administrasi Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang ditinjau dari aspek fasilitas terhadap pelayanan administrasi kepada warga sekolah dapat dikatakan kurang baik, karena terdapatnya beberapa peralatan kerja yang kurang memadai untuk digunakan sebagai penunjang pelayanan administrasi, namun dengan fasilitas seadanya pelayanan administrasi kepada warga sekolah tetap berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang yang telah mendapatkan hasil akreditasi dengan nilai C, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar proses pelaksanaan akreditasi sekolah telah berjalan dengan baik, meskipun hasilnya belum dapat memuaskan pihak sekolah. Hal ini terbukti secara kuantitas kelulusan siswa SD Negeri di Kecamatan Ngabang mencapai seratus persen (100%) selama tiga tahun secara

berturut-turut (tahun 2005, 2006, dan 2007), walaupun nilai akreditasinya relatif rendah, yakni nilai C.

Meskipun terjadi kenaikan rata-rata hasil Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang diperoleh siswa SD Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak selama tiga tahun berturut-turut (tahun 2005, 2006, dan 2007), namun kenaikan nilai rata-rata hasil UAS tersebut masih tergolong relatif rendah dan belum memuaskan bagi warga sekolah pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak khususnya, dan warga masyarakat Kabupaten Landak pada umumnya bila dibandingkan dengan nilai rata-rata hasil UAS pada SD Negeri yang terdapat di ibukota Kabupaten Landak yang sejak tahun 2005, 2006 sampai pada tahun 2007 memperoleh nilai rata-rata 7 (Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Landak).

Relatif rendahnya nilai rata-rata hasil UAS yang diperoleh SD Negeri di Kabupaten Landak pada tahun 2007, ternyata berhubungan erat dengan nilai akreditasi C pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang yang telah diberikan oleh pihak BAS Provinsi Kalbar. Kenyataan ini terbukti dengan penerapan kurikulum dan proses pembelajaran di SD Negeri di Kecamatan Ngabang yang tidak sesuai dengan standar kurikulum nasional, administrasi dan manajemen sekolah yang belum memadai, sarana dan prasarana sekolah yang kurang mendukung dalam proses belajar mengajar, kurangnya perhatian kepala sekolah terhadap aparat birokrasi SD Negeri di Kecamatan Ngabang dalam peningkatan kualitas siswa, dan lain sebagainya. Adapun dengan kondisi nilai akreditasi C yang diperoleh SD Negeri di Kecamatan Ngabang sebagaimana tersebut di atas menyebabkan ada

kecenderungan para guru tidak begitu semangat dalam mengajar siswanya dan tidak begitu peduli dengan kualitas kelulusan siswanya.

Kenyataan ini terbukti dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan seorang guru yang merangkap sebagai wali kelas VI SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan), yang mengungkapkan sebagai berikut:

"Saya mengajar di SD Negeri di Kecamatan Ngabang ini kurang lebih 10 tahun lamanya, namun menurut saya sampai sekarang tidak adaperkembangan yang berarti bagi kemajuan sekolah ini baik kemajuan dalam peningkatan kualitas siswanya maupun peningkatan kualitas sekolahnya. Bagaimana kualitas siswa dan kualitas sekolah ini mau meningkat, kalau kepala sekolahnya sendiri saja kurang memperhatikan kurikulum sekolah, administrasi dan manajemen sekolah, serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses belajar mengajar di sekolah ini. Sehingga jangan heran jika saya dan teman-teman lain terlihat kurang begitu semangat mengajar di SD Negeri di Kecamatan Ngabang ini, apalagi jika pihak sekolah menuntut kepada kami untuk dapat meningkatkan kualitas siswa dan kualitas sekolah ini"(Wawancara, 1 April 2009).

Hasil wawancara tersebut di atas, menunjukkan bahwa relatif rendahnya nilai rata-rata hasil UAS yang diperoleh para siswa SD Negeri di Kecamatan Ngabang antara lain karena kurang semangatnya guru yang mengajar di sekolah tersebut sebagai akibat kurangnya perhatian kepala sekolah terhadap kurikulum dan proses pembelajaran, administrasi dan manajemen sekolah, serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses belajar mengajar. Adapun kondisi ini pada akhirnya berimbas pada relatif rendahnya nilai akreditasi yang diperoleh SD Negeri di Kecamatan Ngabang. Sehingga dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa relatif rendahnya nilai rata-rata UAS yang diperoleh para siswa SD Negeri di Kecamatan Ngabang sejak tahun 2005 sampai tahun 2007 memiliki hubungan

atau korelasi dengan nilai akreditasi C yang diperoleh SD Negeri di Kecamatan Ngabang.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Sekolah Pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang

Status akreditasi yang diperoleh Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Ngabang diharapkan dapat meningkatkan kinerja sekolah dengan tujuan akhir agar kualitas sekolah tersebut dapat ditingkatkan. Peningkatan ini dapat diukur dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh SD Negeri di Kecamatan Ngabang. Salah satunya adalah dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Peningkatan kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap SD Negeri di Kecamatan Ngabang yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan baik terhadap kepala sekolah maupun terhadap salah seorang guru SD Negeri di Kecamatan Ngabang (informan), maka dapat diketahui bahwa SD Negeri di Kecamatan Ngabang memperoleh nilai akreditasi sekolah C. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai akreditasi yang diperoleh SD Negeri di Kecamatan Ngabang. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Sekolah

Secara umum, disadari bahwa untuk mencapai tujuan akhir sebuah kebijakan memerlukan adanya keseriusan dan sikap dari pelaksana kebijakan. Berkaitan dengan akreditasi SD Negeri di Kecamatan Ngabang yang telah dilaksanakan oleh BAS, peran kepemimpinan dari kepala sekolah menjadi sangat penting.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Sekolah dan Dewan Guru (informal kunci), maka dapat diketahui bahwa relatif rendahnya nilai akreditasi sekolah yang diperoleh SD Negeri di Kecamatan Ngabang, antara lain disebabkan karena sangat kurangnya pendelegasian tugas kepada bawahannya. Di samping itu para guru kurang diberikan motivasi dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Dalam hal monitoring dan evaluasi, kepala sekolah juga kurang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen sekolah sehari-hari, dan kepala sekolah sering tidak berada di tempat.

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar (SD) agar memperoleh nilai akreditasi yang sangat memuaskan, maka sarana dan prasarana sekolah mutlak untuk ditingkatkan. Sehubungan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di lapangan, maka dapat diketahui bahwa kegagalan SD Negeri di Kecamatan Ngabang dalam memperoleh nilai akreditasi yang memuaskan, antara lain disebabkan karena kurang mendukungnya sarana dan prasarana sekolah yang

dimiliki SD Negeri di Kecamatan Ngabang, yakni sekolah tidak memiliki alat peraga, keterbatasan buku bacaan yang mendukung dalam proses belajar mengajar.

3. Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik (guru) sangat diperlukan dalam menjalankan kebijakan akreditasi sekolah. Kualitas dan kinerja guru sangat dituntut agar dapat bekerja dengan lebih baik. Khusus SD Negeri di Kecamatan Ngabang yang telah memperoleh nilai akreditasi sekolah yang relatif rendah (nilai C), ternyata tidak terlepas dari peran tenaga pendidik. Peran tenaga pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar selama ini dirasakan sangat kurang. Kenyataan ini terlihat dari realisasi kehadiran para guru, kegiatan evaluasi diri yang tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh para guru, dan lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa alasan dan faktor di atas, penulis mencoba untuk menganalisis dan membandingkannya dengan beberapa teori yang ada. Ternyata jelas terlihat bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Wahab (2001:29), bahwa faktor itu antara lain adalah sumber-sumber kebijakan, koordinasi dan sikap para pelaksana.

Namun perlu disadari bahwa setiap organisasi merupakan suatu sistem dimana di dalamnya terdapat unit atau bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya, di samping terdapat beberapa orang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. SD Negeri di Kecamatan Ngabang sebagai sebuah

organisasi tidak akan terlepas dari sistem dan alur kerja yang melekat di dalamnya. Sehubungan dengan hal itu, maka peran pimpinan dalam hal ini kepala sekolah dan para Guru menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas sekolah dan kualitas siswanya.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akreditasi pada SD Negeri yang ditetapkan oleh BAS Kabupaten Landak mencakup komponen-komponen sebagai berikut: 1) kurikulum dan proses pembelajaran, 2) administrasi dan manajemen sekolah, 3) organisasi dan kelembagaan, 4) sarana dan prasarana sekolah, 5) ketenagaan, 6) pembiayaan dan pendanaan, 7) peserta didik, 8) peran serta masyarakat, dan 9) lingkungan/kultur sekolah terhadap SD Negeri di Kecamatan Ngabang pada tahun 2008 telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas siswa SD Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
2. Hasil akreditasi menunjukkan bahwa SD Negeri di wilayah kota Kecamatan Ngabang memperoleh nilai akreditasi B, sementara SD Negeri di daerah pesisir memperoleh nilai C.
3. Kepala sekolah pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan administrasi kepada peserta didik kurang memperhatikan aspirasi yang berkembang di kalangan peserta didik. Berbagai keluhan yang disampaikan peserta didik SD Negeri di Kecamatan Ngabang hanya direspon oleh kepala sekolah secara positif.

4. Pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang hanya sebatas pada prosedur penerimaan siswa baru, penetapan biaya administrasi masuk, sedangkan kebijakan peningkatan mutu berada pada pimpinan yang lebih tinggi.
5. Kinerja Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang dalam pemberian pelayanan administrasi kepada peserta didik dilihat dari aspek responsivitas dapat dikatakan baik.
6. Kepala Sekolah SD Negeri di Kecamatan Ngabang merespon secara positif program-program Dinas Pendidikan Kabupaten Landak namun dalam pelaksanaannya banyak mendapatkan kendala dan keterbatasan pada pihak sekolah.
7. Faktor utama yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan akreditasi sekolah pada SD Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak adalah, antara lain: minimnya sarana dan prasarana, lingkungan/kultur dan dukungan masyarakat serta keterbatasan sumber daya manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepala SD Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak selaku pelaksana kebijakan akreditasi sekolah hendaknya menerapkan manajemen sekolah berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
2. Kepala sekolah hendaknya dapat memberikan motivasi dan kesempatan bagi para guru dan tenaga administrasi yang bekerja di SD Negeri di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan kualitas kelulusan siswa dan kualitas sekolah.
3. Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mengambil kebijakan yang mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan, antara lain penyediaan sarana dan prasarana, ketenagaan, dan menciptakan lingkungan/kultur yang dinamis.
4. Pemerintah Kabupaten hendaknya selalu memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia di sekolah, seperti peningkatan kualifikasi sumber daya manusia (guru/tenaga kependidikan).
5. BAS hendaknya mensosialisasikan kebijakan BASNAS sebelum pelaksanaan akreditasi tersebut sehingga pihak sekolah akan mempersiapkan diri dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, S. Z. (1993). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bryant, C. dan White, L.G. (1987). *Manajemen Pembangunan: Untuk Negara Berkembang*. Alih bahasa Rusyanto L. Simatupang, Jakarta: LP3ES.
- Cernea, M. (1988). *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan: Variabel-variabel Sosiologi di dalam Pembangunan Pedesaan*. Alih Bahasa Basilius Bengo Teuku. Jakarta: UI Press.
- Dahlan, A. (1980). *Jaringan Komunikasi Sosial di Pedesaan sebagai Saluran Pemerataan Informasi*, dalam: Alfian (ed), *Kemiskinan Struktural*, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Danim, S. (2000). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, W.N. (2001), *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada, University Press.
- Dwiyanto, A. (1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dwiyanto, A., dkk, (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: PSKK-UGM.
- Edwards III, G.C. (1980) *Implementations and Public Policy*, Washington D.C.: Congressional Quarterly, Inc.,.
- Effendi, S. (1986). *Debirokrasi dan Deregulasi : Upaya meningkatkan Kemampuan Administrasi untuk Melaksanakan Pembangunan*, Yogyakarta: Minneograph.
- Esman, M. J. (1991). *Manajemen Dimentions of Development : Perspectives and Strategis*. Connecticut: Kumarian Press.
- Esman, M.J. and Uphoff, N.T. (1984). *Local Organizations: Intermediaries in Rural Development*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hadad, I. (1983). *Menampilkan Potret Pembangunan Berwajah Swadaya Masyarakat*, Prisma No.4. April 1983, Jakarta: LP3ES.

- Irhomi, T.O. (2004), *Rampaian Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Islamy, I. (1994). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, I. (2000), *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, C. O. (1996), *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Kaharuddin, H.S.S. (1997). *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty
- Knoozt, H. (1990), *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: CV. Arnico.
- Moleong, L.J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadijaja, A.R. (2003), *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kerja*, Jakarta: LAN.
- Rian, D. N. (2003). *Kebijakan publik, (Formulasi, Implementasi, Evaluasi)* Jakarta: PT. Gramedia.
- Sigit, S. (2003), *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen*, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata
- Subarsono, A.G. (2005) *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugioyono, (2002), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfa Beta.
- Sugioyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfa Beta.
- Sugito, (1995), *Studi Implementasi Kebijakan Tata Niaga*, Pontianak: FISIP Universitas Tanjungpura.
- Thoha, M. (1992). *Kebijakan Publik*, Jakarta: Buari Aksara.
- Wahab, S.A. (2002). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno. (1980). *Teori Kebijakan Publik*, Pusat antara Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- , (1987). *Pelayanan Publik, Pemerataan dan Administrasi Negara Baru*, Prisma No. 12, Desember 1986, Jakarta: LP3ES.

....., (2002). *Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 421.3/411/DIKMEN, Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2002/2003 Tingkat SMU/MA dan SMK, Maret 2002.*

....., (2005). *Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 153/U/2003, Tentang Petunjuk teknis kegiatan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2004/2005 Tingkat SMA/MA dan SMK, 11 April 2005.*

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1.

PEDOMAN WAWANCARA

I. Identitas Informan :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Jabatan dalam Pekerjaan :

Alamat :

II. Pertanyaan Untuk Pelaksanaan Akreditasi Sekolah oleh pihak BAS terhadap Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak :

1. Proses pelaksanaan Akreditasi Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?
2. Mekanisme yang diterapkan oleh pihak BAS dalam Akreditasi Sekolah
3. Penilaian kurikulum dan proses pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri (SDN) kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?
4. Penilaian administrasi dan manajemen sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?
5. Penilaian organisasi/kelembagaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) kecamatan Ngabang Kabupaten Landak ?

6. Penilaian sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri (SDN) kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?
7. Penilaian tenaga pendidik /guru yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?
8. Penilaian dalam pembiayaan dan pendanaan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?
9. Penilaian terhadap peserta didik (siswa) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?
10. Peran serta masyarakat terhadap Sekolah Dasar Negeri (SDN) kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2.

PEDOMAN WAWANCARA

I. Identitas Informan :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Jabatan dalam Pekerjaan :

Alamat :

II. Pertanyaan Untuk Kinerja Kepala Sekolah (Aparat Birokrasi) Sekolah

Dasar Negeri (SDN) Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak :

1. Kinerja Kepala Sekolah (Aparat Birokrasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?
2. Akuntabilitas (tanggungjawab) Kepala Sekolah terhadap warga sekolah?
3. Responsivitas Kepala Sekolah terhadap aspirasi warga sekolah?
4. Efisiensi waktu Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas?
5. Orientasi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah?
6. Fasilitas pelayanan yang diberikan Kepala Sekolah?
7. Apakah Kepala Sekolah melakukan pengawasan secara terencana dan berkala sesuai dengan ketentuan?
8. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini dalam menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar?
9. Bagaimana tenaga yang ada di sekolah ini?

10. Bagaimana pendanaan dan pembiayaan yang ada di sekolah ini dalam rangka menunjang proses belajar mengajar? (sumbernya dari mana dan bagaimana penggunaannya)
11. Bagaimana proses penerimaan peserta didik di sekolah?
12. Bagaimana proses pengembangan peserta didik yang ada di sekolah ini dalam rangka menyiapkan baik fisik maupun mental untuk menunjang proses pembelajaran?
13. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap perkembangan sekolah ini baik berupa finansial, moral, informasi maupun pemikiran atau ide-ide?
14. Bagaimana harapan masyarakat terhadap pendidikan yang ada di sekolah ini?
15. Bagaimana usaha sekolah dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya antara lain pendidikan yang berpusat pada pengembangan peserta didik, lingkungan yang kondusif serta tata krama hubungan sosial di sekolah ini?

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA**A. Identitas Informan :**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Jabatan dalam Pekerjaan :

Alamat :

B. Pertanyaan Untuk Guru :

1. Kurikulum apa saja yang dilaksanakan disekolah ini? (kurikulum nasional atau kurikulum lokal)
2. Bagaimana proses kegiatan pembelajaran di sekolah ini?
 - a. Perencanaan pembelajaran, apakah guru melakukan penyusunan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku? (bukti dokumen satuan pembelajaran ada/tidak)
 - b. Apakah pelaksanaan pembelajaran setiap harinya berjalan dengan baik?
 - c. Bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran di sekolah ini?
3. Bagaimana administrasi yang ada di sekolah ini, apakah sekolah ini sudah mempunyai acuan bagi pengembangan rencana operasional dan program sekolah?
4. Apakah pihak sekolah menerapkan MBS/(manajemen berbasis sekolah)?
5. Apakah Kepala Sekolah menerapkan pola kepemimpinan yang terbuka dan melakukan pendelegasian tugas dengan baik?

6. Apakah Kepala Sekolah melakukan pengawasan secara terencana dan berkala sesuai dengan ketentuan?
7. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini dalam menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar?
8. Bagaimana ketenagaan yang ada di sekolah ini?
9. Bagaimana pendanaan dan pembiayaan yang ada di sekolah ini dalam rangka menunjang proses belajar mengajar? (sumbernya dari mana dan bagaimana penggunaannya)
10. Bagaimana proses penerimaan peserta didik di sekolah?
11. Bagaimana proses pengembangan peserta didik yang ada di sekolah ini dalam rangka menyiapkan baik fisik maupun mental untuk menunjang proses pembelajaran?
12. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap perkembangan sekolah ini baik berupa finansial, moral dan informasi maupun pemikiran atau ide-ide?
13. Bagaimana harapan masyarakat terhadap pendidikan yang ada di sekolah ini?
14. Bagaimana usaha sekolah dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya antara lain pendidikan yang berpusat pada pengembangan peserta didik, lingkungan yang kondusif serta tata krama hubungan sosial di sekolah ini?

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA DENGAN DUA ORANG ASESOR

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban
1.	Proses pelaksanaan Akreditasi Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri kecamatan Ngabang Kabupaten Landak	a. Dilaksanakan sosialisasi tentang akreditasi kepada kepala-kepala sekolah, sekaligus penyerahan perangkat evaluasi diri ke sekolah-sekolah b. BAS Kabupaten memberikan batas waktu penyerahan kembali evaluasi diri ke BAS Kabupaten c. Mengadakan sosialisasi kepada Kepala Sekolah yang akan diakreditasi sekolahnya sampai paham d. Membagikan instrumen evaluasi diri sekolah diisi dikembalikan ke BAS Kabupaten e. Menurunkan asesor untuk melakukan visitasi dan kemudian menyampaikan hasil visitasi ke BAS Kabupaten f. Sosialisasi tentang akreditasi penyerahan perangkat evaluasi diri Kepala Sekolah yang akan diakreditasi, penetapan tanggal penyerahan kembali evaluasi diri Kepala sekolah g. BAS menetapkan tanggal asesor melakukan visitasi pada sekolah yang akan diakreditasi h. Pelaporan asesor kepada BAS
2.	Mekanisme yang diterapkan oleh pihak BAS dalam Akreditasi Sekolah	a. Sekolah mengajukan permohonan untuk di akreditasi, dengan menyerahkan evaluasi diri yang dilengkapi surat pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan b. BAS Kabupaten menugaskan 2 orang asesor untuk melaksanakan visitasi c. BAS Kabupaten menugaskan 2 orang asesor dengan cara silang kabupaten d. Asesor mengadakan pertanyaan sesuai evaluasi diri yang telah diisi oleh Kepala Sekolah e. Menyampaikan laporan visitasi kepada BAS Kabupaten f. BAS Kabupaten mengadakan rapat pleno g. 2 orang asesor mendatangi sekolah yang akan diakreditasi h. Mengadakan wawancara dengan warga sekolah sesuai dengan isian evaluasi diri yang diisi untuk melihat bukti fisik i. Kegiatan ini dilakukan 2 hari untuk satu sekolah, kemudian asesor melakukan perhitungan untuk menentukan peringkat j. Sidang pleno oleh BAS dengan asesor

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban
3.	Penilaian kurikulum dan proses pembelajaran di Sekolah Dasar kecamatan Ngabang Kabupaten Landak	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekolah ini belum memiliki dokumen kurikulum nasional maupun lokal b. Sekolah telah memiliki dokumen kurikulum baik nasional maupun lokal c. Guru belum mengembangkan baik silabus maupun RPP d. Sekolah tidak memiliki program tahunan/ semester e. Sekolah telah memiliki kurikulum muatan lokal f. Guru tidak melakukan penilaian tindakan kelas, remedial, memiliki komputer, praktek kesenian, kegiatan keagamaan g. Untuk SDN 45 Reok Majau unsur kurikulum memang masih perlu pembenahan dan perbaikan agar kedepan lebih baik
4.	Penilaian administrasi dan manajemen sekolah di Sekolah Dasar Negeri kecamatan Ngabang Kabupaten Landak	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyak administrasi yang belum dibenahi. Sekolah tidak memiliki program tahunan, jangka pendek maupun jangka panjang b. Sekolah tidak memiliki program jangka panjang 8 tahun, jangka pendek 4 tahun dan program tahunan c. Administrasi Kepala Sekolah baru sebagian kecil dilaksanakan atau dikerjakan Administrasi dan manajemen Kepala Sekolah juga sangat perlu pembenahan dan perbaikan
5.	Penilaian organisasi/kelembagaan Sekolah Dasar Negeri kecamatan Ngabang Kabupaten Landak	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekolah ini belum memiliki peraturan khusus, diluar aturan yang ditentukan oleh pemerintah b. Sekolah belum memiliki peraturan khusus di luar peraturan yang dibuat pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas belajar c. Sekolah belum menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan baik satu daerah, luar daerah/luar negeri, juga belum menjalin kerja sama dengan lembaga non pendidikan Untuk unsur organisasi/kelembagaan masih sangat perlu dukungan komite/masyarakat
6.	Penilaian sarana dan prasaran di Sekolah Dasar Negeri kecamatan Nagabang Kabupaten Landak	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekolah ini belum memiliki jaringan listrik, air bersih dan jaringan telepon. Sarana lain juga masih minim keadaanya b. Sekolah belum memiliki laboratorium komputer, instalasi listrik, air bersih, jaringan telepon, jaringan internet c. Sekolah tidak memiliki sarana kesenian, sarana peribadatan d. Sarana dan prasarana perlu dimanfaatkan secara maksimal

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban
7.	Penilaian tenaga pendidik/guru yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri kecamatan Ngabang Kabupaten Landak	a. Jumlah guru di sekolah ini kurang, kualifikasi guru mata pelajaran olahraga dan pendidikan agama kristen b. Sekolah ini juga tidak memiliki tenaga khusus bimbingan dan konseling, kebersihan, keamanan sekolah c. Sekolah tidak mengundang nara sumber /konsultan untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran d. Sekolah ini tidak memberikan penghargaan ke guru yang berprestasi e. Tenaga pendidik masih kurang sehingga sekolah mengambil guru honor yang dibayar lewat dana BOS
8.	Penilaian dalam pembiayaan dan pendanaan di Sekolah Dasar Negeri kecamatan Ngabang	a. Sekolah belum menganggarkan program peningkatan kreativitas belajar dan mengajar maupun program kreativitas guru b. Sekolah tidak menyediakan dana untuk kegiatan kreativitas siswa dan meningkatkan profesional guru c. Sekolah tidak mengalkasikan kelebihan jam mengajar d. Sekolah tidak melaksanakan subsidi silang kepada siswa yang kurang mampu e. Sekolah tidak mencari dana beasiswa yang berprestasi dan siswa kurang mampu f. Pembiayaan sangat kurang perlu dukungan masyarakat/komite untuk mencari dana tambahan
9.	Penilaian terhadap peserta didik (siswa) di Sekolah Dasar Negeri kecamatan Ngabang Kabupaten Landak	a. Masih tingginya persentase peserta didik yang tinggal kelas (mengulang). Nilai rata-rata ujian juga masih minim dan sekolah ini belum memenuhi prestasi baik akademik maupun non akademik b. Di sekolah ini angka putus sekolah, siswa mengulang masih tinggi. Sekolah ini tidak mengirim siswa pada berbagai lomba c. Sekolah ini tidak memiliki program pengembangan bakat, minat dan kreativitas siswa, dan program layanan bimbingan konseling d. Peserta didik perlu penanganan secara maksimal agar lebih baik
10.	Peran serta masyarakat terhadap Sekolah Dasar Negeri kecamatan Ngabang kabupaten landak	a. Pengurus komite kurang proaktif terhadap program sekolah dan partisipasi orang tua siswa kepada sekolah sangat minim b. Peran serta masyarakat di sekolah ini masih sangat kurang c. Komite sekolah berfungsi sebagaimana mestinya d. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dan pihak sekolah diharapkan dapat mengadakan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat.

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Kepala sekolah	Nama Sekolah
1.	Kinerja Kepala Sekolah (Aparat birokrasi) Sekolah Dasar kecamatan Ngabang Kabupaten Landak	<p>a. Kinerja para Kepala Sekolah dalam mereka melakukan tupoksinya cukup, ini sesuai dengan arah kebijakan dari Dinas Pendidikan. Lewat Kelompok Kerja Kepala Sekolah(K3S) juga selalu diperdayakan.</p> <p>b. Belum maksimal , dikarenakan, banyak faktor terutama Kepala Sekolah masih mengajar full satu kelas kemudian kekurangan guru, fasilitas, dan kurangnya dukungan dari orang tua murid.</p> <p>c. Meaksanakan bimbingan terhadap guru dan pegawai, memonitor setiap kegiatan di sekolah, menyelesaikan setiap administrasi</p> <p>d. Kinerja Kepala Sekolah sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi, administrasi sekolah dan administrasi kelas juga sudah baik namun perlu ditingkatkan kembali</p> <p>e. Kinerja Kepala Sekolah masih sangat perlu ditingkatkan, administrasi sekolah dan administrasi kelas juga perlu pembenahan</p>	<p>SDN 02 Ngabang</p> <p>SDN 45 Reo Majau</p> <p>SDN 69 Emsplamen</p> <p>SDN 16 Ngabang</p> <p>SDN 23 Jelimpo</p>

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Kepala sekolah	Nama Sekolah
2.	Akuntabilitas (tanggungjawab) Kepala Sekolah terhadap warga sekolah	<p>a. Cukup tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga dalam melayani serta membimbing sekolah ini dapat berjalan dengan baik dan kerja sama yang tinggi.</p> <p>b. Sudah cukup baik, Cuma masih ada beberapa hal yang belum terlaksana karena kekurangan sarana dan prasarana, terutama tenaga pendidik</p> <p>c. Mengusahakan hal-hal sangat diperlukan oleh warga sekolah, memperhatikan siswa/ anak yang mengalami masalah dalam mengikuti pendidikan, bagi siswa yang sakit diberi obat Cuma-Cuma/ tidak dipungut biaya</p> <p>d. Tanggung jawab terhadap sekolah atau tugas cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi, tanggungjawab sekolah terhadap warga sekolah</p> <p>e. Tanggung jawab terhadap sekolah atau tugas cukup baik</p>	<p>SDN 02 Ngabang</p> <p>SDN 45 Reo Majau</p> <p>SDN 69 Emsplasmen</p> <p>SDN 16 Ngabang</p> <p>SDN 23 Jelimpo</p>

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Kepala sekolah	Nama Sekolah
3.	Responsivitas Kepala Sekolah terhadap aspirasi warga sekolah	<p>a. Cukup tinggi, segala program yang menyangkut siswa diciptakan (karate, poco-poco, dan lain-lain). Bagi guru dan masyarakat juga selalu diperhatikan</p> <p>b. Cukup baik dan ditanggapi sebagai bahan acuan Kepala Sekolah untuk membuat suatu program sekolah</p> <p>c. Selalu ada kerja sama dengan masyarakat, menanggulangi hal-hal yang timbul di sekolah yang mengancam siswa maupun guru</p> <p>d. Respon Kepala Sekolah terhadap aspirasi warga sekolah cukup baik, sehingga mempengaruhi kinerja guru-guru di sekolah tersebut</p> <p>e. Selalu ada kerja sama dengan masyarakat, menanggulangi hal-hal yang timbul di sekolah yang mengancam siswa maupun guru</p>	<p>SDN 02 Ngabang</p> <p>SDN 45 Reo Majau</p> <p>SDN 69 Emsplasmen</p> <p>SDN 16 Ngabang</p> <p>SDN 23 Jelimpo</p>

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Kepala sekolah	Nama Sekolah
4.	Efisiensi waktu Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas	<p>a. Disamping tugas pokok sebagai pendidik juga diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah waktu yang digunakan dalam melakukan tugas dan tanggungjawab cukup dan kadang-kadang dilakukan secara ekstra dalam menyelesaikannya.</p> <p>b. Cukup efisien kendalanya karena di samping melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah juga sebagai guru kelas (mengajar)</p> <p>c. Melaksanakan tugas sesuai jam dinas, mengikuti rapat/pertemuan yang dilakukan oleh dinas yang menyangkut tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah, mengatur waktu untuk setiap kegiatan</p> <p>d. Efisiensi waktu Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi sehingga hasil pembelajaran menjadi lebih baik, efisien dan lebih efektif</p> <p>e. Efisiensi waktu Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga hasil pembelajaran menjadi lebih baik</p>	<p>SDN 02 Ngabang</p> <p>SDN 45 Reo Majau</p> <p>SDN 69 Emsplasmen</p> <p>SDN 16 Ngabang</p> <p>SDN 23 Jelimpo</p>

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Kepala sekolah	Nama Sekolah
5.	Orientasi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah	a. Berorientasi/ berwawasan kedepan. Saat ini SD inti telah memulai pembelajaran berwawasan teknologi yaitu TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). b. Sudah cukup baik walaupun belum sepenuhnya c. Melayani tenaga guru yang memerlukan bimbingan dalam melaksanakan tugasnya , membimbing dalam pengisian data-data sekolah d. Orientasi terhadap pelayanan sangat baik sehingga ada program lingkungan hidup dan program adiwiyata e. Cukup baik walaupun belum sepenuhnya	SDN 02 Ngabang SDN 45 Reo Majau SDN 69 Emplament SDN 16 Ngabang SDN 23 Jelimpo
6.	Fasilitas pelayanan yang diberikan Kepala Sekolah	a. Kepada siswa cukup memadai, kepada guru segala sesuatu yang diperlukan dalam menunjang PBM semuanya dilengkapi, ini sebagai bentuk meningkatkan semangat dan kinerja mereka. b. Sudah cukup baik tapi belum sepenuhnya karena kekurangan/keterbatasan tenaga , dana dan sebagainya c. Saran, sumbangan pemikiran d. Fasilitas pelayanan sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan pelayanannya sehingga dirasakan manfaatnya e. udah cukup baik tapi belum sepenuhnya karena kekurangan/keterbatasan tenaga , dana dan sebagainya	SDN 02 Ngabang SDN 45 Reo Majau SDN 69 Emsplasmen SDN 16 Ngabang SDN 23 Jelimpo

Lampiran 6

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Guru per Sekolah	Nama Sekolah
1.	Kurikulum apa saja yang dilaksanakan disekolah ini? (kurikulum nasional atau kurikulum lokal)	a. Kurikulum KTSP b. Kurikulum KTSP c. Kurikulum Nasional dan lokal d. Kurikulum Nasional e. Kurikulum Nasional f. Kurikulum Nasional g. Kurikulum Nasional h. Kurikulum Nasional i. Kurikulum Nasional j. Kurikulum Nasional	SDN 02 Ngabang SDN 02 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 45 Reo Majau SDN 45 Reo Majau SDN 69 Emsplasmen SDN 69 Emsplasmen SDN 23 Jelimpo SDN 23 Jelimpo
2.	Bagaimana proses kegiatan pembelajaran di sekolah ini? a. Perencanaan pembelajaran , apakah guru melakukan penyusunan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku?(bukti dokumen satuan pembelajaran ada/tidak)	<ul style="list-style-type: none"> • Program Tahunan, Program semester, RPP dan Silabus • Ya, ada • Kami masing-masing guru membuat/menyusun sesuai dengan kurikulum yang ada • Masing-masing guru melakukan penyusunan dengan kurikulum yang ada di sekolah • Belum ada • Belum • Ya , ada bagi guru yang aktif, tapi masih ada yang belum menyusun dan ada yang baru mulai • Ada dengan membuat RPP • Ada dengan membuat RPP • Ada dengan membuat RPP 	SDN 02 Ngabang SDN 02 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 45 Reo Majau SDN 45 Reo Majau SDN 69 Emsplasmen SDN 69 Emsplasmen SDN 23 Jelimpo SDN 23 Jelimpo

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Guru per Sekolah	Nama Sekolah
	<p>b. Pelaksanaan pembelajaran, apakah setiap harinya berjalan dengan baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semua pembelajaran di kelas berjalan dengan baik yaitu tepat pada waktu yang ada. • Ya berjalan dengan baik • Ya berjalan dengan baik • Semua berjalan baik dan lancar • Selalu berjalan dengan baik • Ya • Ya • Ya, pelaksanaannya lancar • Ya, pelaksanaannya lancar 	<p>SDN 02 Ngabang</p> <p>SDN 02 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 45 Reo Majau SDN 45 Reo Majau SDN 69 Emsplasmen SDN 69 Emsplasmen SDN 23 Jelimpo SDN 23 Jelimpo</p>
	<p>c. Bagaimana pelaksanaan evaluasi di pembelajaran sekolah ini?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum pelaksanaan evaluasi pembelajaran Mid semester dan semester • Ya cukup baik, dilaksanakan secara berkala yaitu Mid semester dan semester • Biasanya dilakukan setelah pokok bahasan selesai disampaikan pada siswa • Berjalan sesuai dengan jadwal evaluasi sekolah • Dilaksanakan dengan formatif yang dibuat oleh guru dan sumatif dari kabupaten • Ada dilaksanakan formatif yang dibuat guru yang bersangkutan sumatif dari kabupaten • Selalu dilakukan pada akhir setiap satuan pelajaran (satu pokok bahasan) • Terlaksana dengan baik • Terlaksana dengan baik • Terlaksana dengan baik 	<p>SDN 02 Ngabang</p> <p>SDN 02 Ngabang</p> <p>SDN 16 Ngabang</p> <p>SDN 16 Ngabang</p> <p>SDN 45 Reo majau</p> <p>SDN 45 Reo Majau</p> <p>SDN 69 Emsplasmen</p> <p>SDN 69 Emsplasmen SDN 23 Jelimpo SDN 23 Jelimpo</p>

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Guru per Sekolah	Nama Sekolah
3.	Bagaimana administrasi yang ada di sekolah ini, apakah sudah sekolah ini mempunyai acuan bagi pengembangan rencana operasional dan program sekolah?	a. Sekolah mempunyai acuan yang tertuang pada program tahunan dan semester b. Sudah c. Administrasi masih perlu dibenahi terutama acuan dan pengembangan rencana operasional dan program sekolah d. Baik, sementara ini berjalan sesuai dengan yang ada e. Belum sepenuhnya f. Ada tapi belum sepenuhnya g. Cukup baik, ya h. Ada i. Ada j. Ada	SDN 02 Ngabang SDN 02 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 45 Reo Majau SDN 45 Reo Majau SDN 69 Emsplasmen SDN 69 Emsplasmen SDN 23 Jelimpo SDN 23 Jelimpo
4.	Apakah sekolah ini menerapkan manajemen berbasis sekolah?	a. Tentu saja, karena orang tua siswa ikut terlibat untuk mengembangkan pendidikan di sekolah ini b. Ya, c. Belum dilaksanakan sepenuhnya tetapi mengacu pada manajemen berbasis sekolah d. Ya e. Belum sepenuhnya f. Belum sepenuhnya g. Belum h. Ada i. Ada j. Ada	SDN 02 Ngabang SDN 02 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 45 Reo Majau SDN 45 Reo Majau SDN 69 Emsplasmen SDN 69 Emsplasmen SDN 23 Jelimpo SDN 23 Jelimpo

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Guru per Sekolah	Nama Sekolah
5.	Apakah Kepala Sekolah menerapkan pola kepemimpinan yang terbuka dan melakukan pendelegasian tugas dengan baik?	a. Dalam hal tertentu ada menerapkan kepemimpinan terbuka tetapi juga harus ada pola kepemimpinan tertutup yang sifatnya rahasia. Pendelegasian tugas selalu ada, supaya setiap guru tahu tugasnya dan bertanggungjawab b. Ya, guru mendapat tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan c. Ya namun pendelegasian tugas masih belum merata dan beban tugas belum sesuai/berimbang d. Ya, selalu melakukan tugas dengan baik e. Kurang terbuka f. Ada tetapi belum sepenuhnya g. Ya h. Ada i. Ada j. Ada	SDN 02 Ngabang SDN 02 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 45 Reo Majau SDN 45 Reo Majau SDN 69 Emsplasmen SDN 69 Emsplasmen SDN 23 Jelimpo SDN 23 Jelimpo
6.	Apakah Kepala Sekolah melakukan pengawasan secara terencana dan berkala sesuai dengan ketentuan?	a. Kepala Sekolah sudah melakukan pengawasan secara berencana dan berkala yaitu pada awal, pertengahan dan akhir semester b. Ya, sudah terencana yaitu awal tahu, pertengahan semester dan akhir tahun c. Belum pernah, yang sering dilakukan hanya rapat dewan guru d. Tidak pernah e. Kurang f. Ya tetapi belum sepenuhnya g. Ya h. Ya i. Ya j. Ya	SDN 02 Ngabang SDN 02 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 45 Reo Majau SDN 45 Reo Majau SDN 69 Emsplasmen SDN 69 Emsplasmen SDN 23 Jelimpo SDN 23 Jelimpo

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Guru per Sekolah	Nama Sekolah
7.	Bagaimana sarana dan prasaran yang ada di sekolah ini dalam menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar?	a. Secara umum sarana dan prasaran di sekolah ini cukup memadai sehingga dapat menunjang proses pembelajaran dengan baik. b. Cukup memadai c. Sangat minim, seperti alat-alat peraga atau alat-alat bantu dalam mengajar d. Sangat kurang sekali, seperti alat-alat praktek untuk proses belajar-mengajar tidak ada sama sekali e. Belum memadai f. Belum memadai g. Masih kurang, terutama alat peraga h. Belum lengkap i. Belum lengkap j. Belum lengkap	SDN 02 Ngabang SDN 02 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 45 Reo Majau SDN 45 Reo Majau SDN 69 Emsplasmen SDN 69 Emsplasmen SDN 23 Jelimpo SDN 23 Jelimpo
8.	Bagaimana ketenaga yang ada di sekolah ini?	a. Dari jumlah guru dengan perbandingan murid ada keseimbangan. Kualifikasi pendidikan SLTA 4 orang, S-1 4 orang, DIII ada 1 orang dan DII ada 14 orang b. Cukup, SLTA 4 orang, S-1 4 orang, DIII ada 1 orang dan DII ada 14 orang c. Kami sangat kekurangan tenaga guru dan terpaksa mengambil guru honor dan dibayar dengan dana BOS d. Untuk saat ini sekolah kami masih kekurangan tenaga terutama guru umum dan KTK e. Masih kurang mengajar sistem guru kelas	SDN 02 Ngabang SDN 02 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 45 Reo Majau

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Guru per Sekolah	Nama Sekolah
		f. Masih kurang terutama guru olahraga dan guru agama kristen protestan g. Masih kurang, terutama guru khusus, seperti guru kesenia dan olahraga h. Tenaga guru belum cukup karena masih ada tenaga honor (guru olahraga dan seni budaya) i. Tenaga guru belum cukup karena masih ada tenaga honor (guru olahraga dan seni budaya) j. Masih kurang, terutama guru khusus, seperti guru kesenia dan olahraga	SDN 45 Reo Majau SDN 69 Emsplasmen SDN 69 Emsplasmen SDN 23 Jelimpo SDN 23 Jelimpo
9.	Bagaimana pendanaan dan pembiayaan yang ada di sekolah ini dalam rangka menunjang proses belajar mengajar? (sumbernya dari mana dan bagaimana penggunaannya)	a. Sumber dana pemerintah yaitu dana BOS dengan penggunaan terencana dan terperinci dan Partisipasi orang tua murid untuk menunjang pendidikan b. Dana BOS dan Bantuan orang tua c. Dari dana BOS saja yang ada, belum ada sumber lain. d. Pendanaan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang sumbernya dari BOS, dan digunakan untuk membayar guru honor e. Mengangkat guru honor didanai dari dana BOS f. Dari dana BOS hanya penggunaannya belum begitu baik/ belum jelas g. Pendanaan, terutama buku-buku siswa cukup dan sangat membantu proses belajar mengajar. Sumber dana dari BOS	SDN 02 Ngabang SDN 02 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 45 Reo Majau SDN 45 Reo Majau SDN 69 Emsplasmen

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Guru per Sekolah	Nama Sekolah
		h. Dana BOS untuk melengkapi sarana dan prasarana di sekolah seperti buku pelajaran i. Dana BOS untuk melengkapi sarana dan prasarana di sekolah seperti buku pelajaran j. Pendanaan, terutama buku-buku siswa cukup dan sangat membantu proses belajar mengajar. Sumber dana dari BOS	SDN 69 Emsplasmen SDN 23 Jelimpo SDN 23 Jelimpo
10.	Bagaimana proses penerimaan peserta didik di sekolah?	a. Dibentuk kepanitiaan, waktu mengacu pada edaran Dinas Pendidikan, ada seleksi usia. b. Membentuk panitia, pelaksanaan seleksi dan asal pendidikan siswa (TK) c. Murid baru kami terima tidak dengan cara selekti, tetapi dengan acuan umur sekolah d. Berjalan dengan baik e. Dibentuk panitia dan disiapkan formulir penerimaan siswa baru f. Baik telah dibentuk panitia PMB untuk murid baru g. Penerimaan siswa baru tidak dipungut biaya, hanya biaya baju kostum h. Anak-anak menerima pembelajaran masih ada yang kurang hal ini karena disebabkan berbagai faktor, misalnya dari segi ekonomi i. Penerimaan siswa baru tidak dipungut biaya, hanya biaya j. Baik telah dibentuk panitia PMB untuk murid baru	SDN 02 Ngabang SDN 02 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 45 Reo Majau SDN 45 Reo Majau SDN 69 Emsplasmen SDN 69 Emsplasmen SDN 23 Jelimpo SDN 23 Jelimpo

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Guru per Sekolah	Nama Sekolah
11.	Bagaimana proses pengembangan peserta didik yang ada di sekolah ini dalam rangka menyiapkan baik fisik maupun mental untuk menunjang proses pembelajaran?	<p>a. Dibuka kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang olahraga, kesenian, dan pramuka</p> <p>b. Diadakan kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi pramuka, olahraga</p> <p>c. Bagi anak-anak yang kurang mampu kami bantu dan kami ambil dari dana BOS, dan bagi anak yang pintar serta berbakat terus kami bimbing sehingga dapat kami atasi secara bersama-sama</p> <p>d. Dengan mengadakan bimbingan sehingga murid yang terbelakang dapat diatasi bersama</p> <p>e. Melakukan pembinaan-pembinaan kepada anak-anak yang nakal dan selalu melakukan hukuman kepada yang jarang masuk sekolah berupa membersihkan W.C, mungut sampah disekitar lingkungan sekolah</p> <p>f. Masih kurang karena dilatar belakangi oleh pengaruh lingkungan dan keluarga. Oleh karena itu kami sebagai guru belum dapat meningkatkan proses pembelajaran dengan baik karena disebabkan oleh banyak faktor</p>	<p>SDN 02 Ngabang</p> <p>SDN 02 Ngabang</p> <p>SDN 16 Ngabang</p> <p>SDN 16 Ngabang</p> <p>SDN 45 Reo Majau</p> <p>SDN 45 Reo Majau</p>

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Guru per Sekolah	Nama Sekolah
		<p>g. Anak selalu dibimbing mulai dari awal pelajaran, sampai selesai pelajaran. Dan di sekolah ini setiap hari diterapkan pungut sampah, berbaris yang rapi dan bagi yang bandel diberi peringatan (dipanggil ke kantor untuk dinasehati)</p> <p>h. Dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah hanya dengan memberi anak les</p> <p>i. Anak selalu dibimbing mulai dari awal pelajaran, sampai selesai pelajaran. Dan di sekolah ini setiap hari diterapkan pungut sampah, berbaris yang rapi dan bagi yang bandel diberi peringatan (dipanggil ke kantor untuk dinasehati)</p> <p>j. Dengan mengadakan bimbingan sehingga murid yang terbelakang dapat diatasi bersama</p>	<p>SDN 69 Emsplasmen</p> <p>SDN 69 Emsplasmen</p> <p>SDN 23 Jelimpo</p> <p>SDN 23 Jelimpo</p>
12.	<p>Bagaimana dukungan masyarakat terhadap perkembangan sekolah ini baik berupa financial, moral, informasi maupun pemikiran atau ide-ide?</p>	<p>a. Dukungan masyarakat terhadap sekolah ini yaitu Finansial ketika diminta sumbangan secara sukarela menyambut baik. Moral yaitu menyampaikan laporan ketika menemukan anak main judi</p> <p>b. Masyarakat sangat mendukung perkembangan sekolah ini, yang terbukti menyumbangkan dana untuk kegiatan pembelajaran komputer.</p> <p>c. Dukungan masyarakat masih kurang terutama masalah dana dan masih ada yang menganggap uang BOS sudah cukup dalam pendanaan sekolah</p>	<p>SDN 02 Ngabang</p> <p>SDN 02 Ngabang</p> <p>SDN 16 Ngabang</p>

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Guru per Sekolah	Nama Sekolah
		<p>d. Dukungan dari masyarakat kurang, ada pro dan kontra terhadap guru</p> <p>e. Masih kurang, umumnya dari semua aspek ini, kami sebagai guru masyarakatnya masih bersifat acuh dengan apa yang kami buat di sekolah</p> <p>f. Sangat kurang baik dari segi finansial, moral, informasi maupun gagasan. Dengan demikian perkembangan sekolah ini sangat jauh dibandingkan dengan sekolah lain</p> <p>g. Sebagian masyarakat sangat peduli dan sebagian hanya biasa-biasa saja</p> <p>h. Mereka sangat mendukung perkembangan atau kegiatan yang ada di sekolah ini</p> <p>i. Mereka sangat mendukung perkembangan atau kegiatan yang ada di sekolah ini</p> <p>j. Sebagian masyarakat sangat peduli dan sebagian hanya biasa-biasa saja</p>	<p>SDN 16 Ngabang</p> <p>SDN 45 Reo Majau</p> <p>SDN 45 Reo Majau</p> <p>SDN 69 Emsplasmen</p> <p>SDN 69 Emsplasmen</p> <p>SDN 23 Jelimpo</p> <p>SDN 23 Jelimpo</p>
13.	Bagaimana harapan masyarakat terhadap pendidikan yang ada di sekolah ini?	<p>a. Pada umumnya masyarakat sangat mengharapkan adanya kemajuan yang lebih baik lagi</p> <p>b. Masyarakat secara umum mengharapkan sekolah ini lebih maju, meningkat dan lebih baik lagi</p> <p>c. Asalkan proses belajar berjalan mereka sudah senang dan puas</p> <p>d. Pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar Sesuai dengan tenaga guru yang ada di sekolah ini</p>	<p>SDN 02 Ngabang</p> <p>SDN 02 Ngabang</p> <p>SDN 16 Ngabang</p> <p>SDN 16 Ngabang</p>

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Guru per Sekolah	Nama Sekolah
		e. Guru berusaha, masyarakatnya kurang kerjasama f. Guru sudah berusaha, masyarakatnya kurang mendukung g. Selalu mengharapkan agar sekolah ini lebih baik, lebih maju h. Harapan masyarakat supaya proses pembelajaran berjalan dengan baik i. Harapan masyarakat supaya proses pembelajaran berjalan dengan baik j. Selalu mengharapkan agar sekolah ini lebih baik, lebih maju	SDN 45 Reo Majau SDN 45 Reo Majau SDN 69 Emsplasmen SDN 69 Emsplasmen SDN 23 Jelimpo SDN 23 Jelimpo
14.	Bagaimana usaha sekolah dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya antara lain pendidikan yang berpusat pada pengembangan peserta didik, lingkungan yang kondusif serta tata krama hubungan sosial di sekolah ini?	a. Memberikan dan mengarahkan anak pada pembinaan yang terprogram sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki b. Membiasakan anak didik untuk hidup jujur, disiplin dan kekeluargaan c. Kami sebagai guru berusaha mengajar dengan baik untuk murid-murid kami dan berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar serta menjaga tata krama kami sebagai guru dan masyarakat d. Dengan cara mendidik dan mengajar agama di sekolah maupun di gereja	SDN 02 Ngabang SDN 02 Ngabang SDN 16 Ngabang SDN 16 Ngabang

No.	Pertanyaan	Kategori Jawaban Guru per Sekolah	Nama Sekolah
		<p>e. Melakukan pendekatan dengan orang tua murid dan menyampaikan aturan-aturan yang dibuat sekolah, tetapi kenyataannya lingkungan sekolah masih kurang aman, terkadang guru teracah ketika melakukan suatu tindakan dengan murid</p> <p>f. Melakukan pendekatan dengan masyarakat tetapi masyarakat kurang menanggapi, bahkan kami sebagai guru merasa teracah ketika ada masalah yang muncul di sekolah</p> <p>g. Sekolah selalu menjalin hubungan dengan masyarakat, bila ada kegiatan yang menyangkut masalah keberhasilan siswa, seperti kelulusan, kenaikan kelas, tahun ajaran baru sekolah ini selalu mengadakan pertemuan dengan orang tua murid dalam bentuk rapat bersama</p> <p>h. Kita mengupayakan peningkatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya peserta didik dan tata krama di sekolah.</p>	<p>SDN 69 Emsplasmen</p> <p>SDN 69 Emsplasmen</p> <p>SDN 23 Jelimpo</p> <p>SDN 23 Jelimpo</p>

Lampiran 7.

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Pengamatan	Ada	Tidak ada
1.	Apakah sekolah melaksanakan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal serta melakukan perencanaan pembelajaran yang dibuktikan dengan dokumen?	√	
2.	Apakah sekolah memiliki perencanaan strategis dengan rumusan arah (visi dan misi) yang jelas serta menerapkan manajemen berbasis sekolah?	√	
3.	Apakah kepala sekolah menerapkan pola kepemimpinan yang terbuka dan melakukan pendelegasian tugas dengan baik serta melaksanakan pengawasan secara terencana dan berkala?		√
4.	Apakah sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan tercapainya tujuan sekolah dan tuntutan pedagogik yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermakna?	√	
5.	Apakah sekolah memiliki tenaga kependidikan profesional yang jumlahnya memadai dengan kualifikasi, kompetensi, dan tingkat kesesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku?		√
6.	Apakah sekolah memiliki dana pendidikan yang cukup dan berkelanjutan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar yang bermutu disekolah?	√	
7.	Apakah sekolah menerima peserta didik didasarkan atas kriteria yang jelas, transparan, dan akuntabel?	√	

No.	Pengamatan	Ada	Tidak ada
8.	Apakah peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan?		√
9.	Apakah sekolah bersikap responsif, tanggap, dan peka terhadap dinamika lingkungan dan secara jelas menginternalisasikannya kedalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan menumbuh kembangkan budaya yang kondusif bagi peningkatan efektifitas proses pendidikan disekolah serta penataan lingkungan fisik yang mendukung proses pembelajaran?	√	

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 8.

FOTO-FOTO KEGIATAN



SDN 02 Ngabang



**Kepala Sekolah SDN 2 Ngabang
Bapak Endang, S.Pd**



SDN 16 Ngabang



SDN 23 Jelimpo



Kepala Sekolah dan Dewan Guru

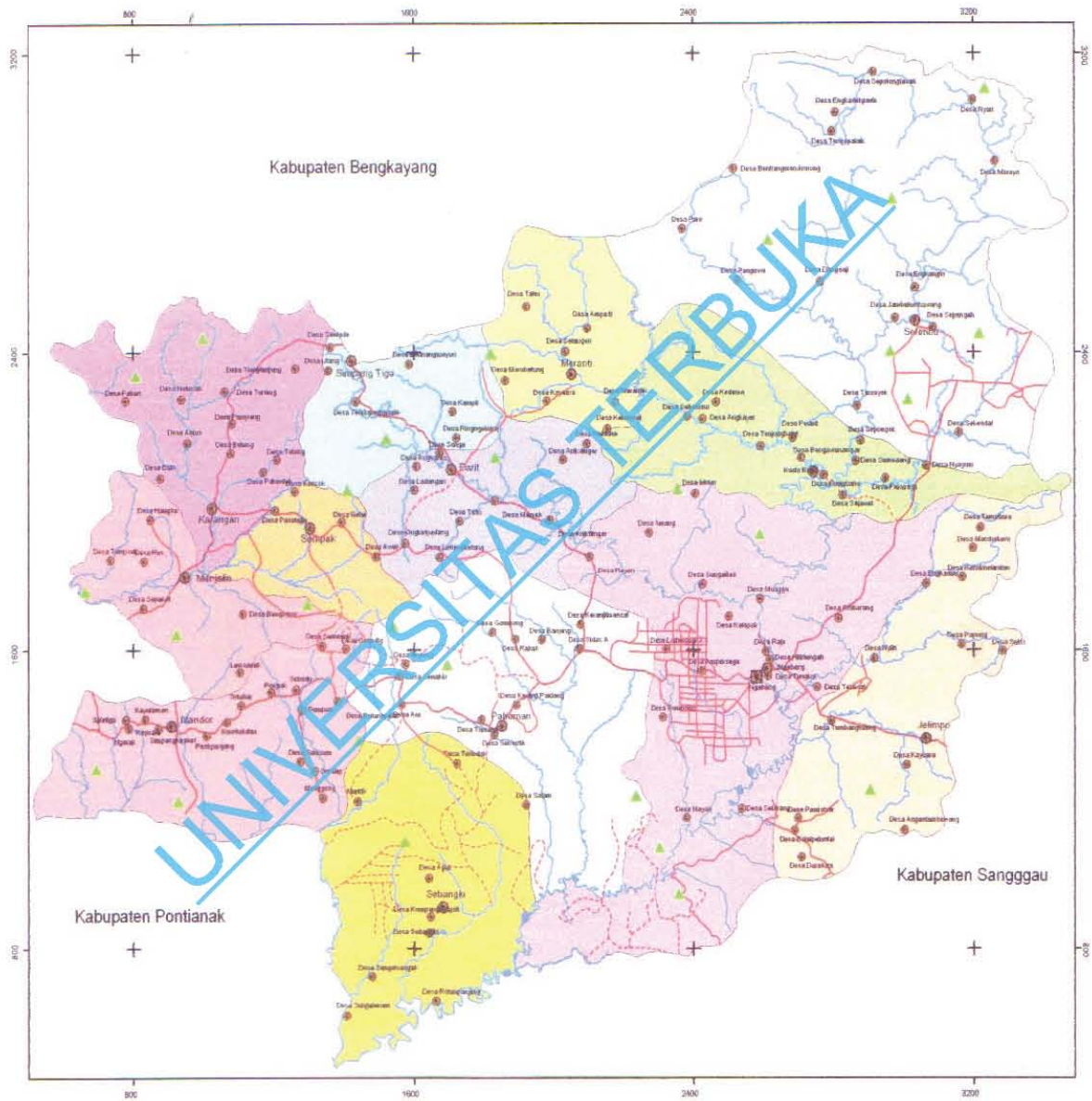
SDN 45 REO MAJAU

SDN 69 EMPLASMEN

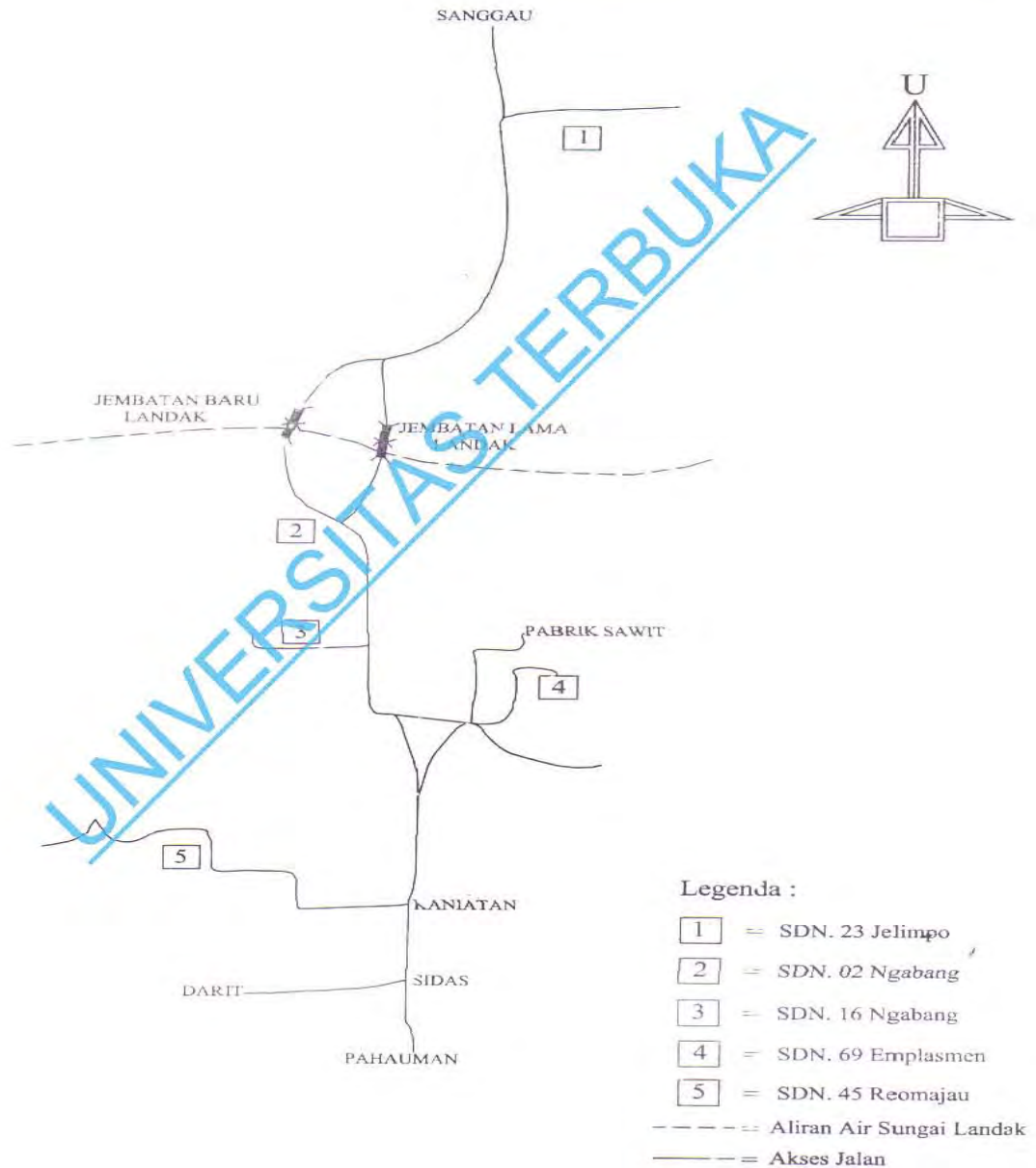


Kepala Sekolah Bapak Brusli Umar, S.Pd

PETA KABUPATEN LANDAK



DENAH PENELITIAN
Implementasi Akseditasi Sekolah Pada
Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan
Ngabang Kabupaten Landak



BIO DATA



1. Nama : ERICK YOHANES
 2. No. Mahasiswa : E. 014945523
 3. Tempat, Tgl. Lahir : Nangka, 30 April 1955
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 6. Alamat : Jln. Afandi Rani Komplek BTN. Bali Permai Ngabang Blok. E No. 11
 7. Agama : Katholik
 8. Pendidikan : - SD Subsidi Pahauman Tamat Tahun 1969
 - SMP Bantuan Pahauman Tamat Tahun 1972
 - SPG Singkawang Tamat Tahun 1976
 - S.1. Fakultas Sospol UT. Program Studi Administrasi Negara Tahun 2006
 - Terdaftar S 2 . UT, Tahun 2007
 9. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 10. Nama Orang Tua : - Ayah : F. Gi o n g
 - Ibu : Y. Geda
 11. Nama Istri : Nober ha. A. Ma. Pd
 12. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 13. A n a k : 1. Riasinir Yuvensius Iwan Talaga, S.Hut
 2. Riasinir Prisca Pitaria Talaga, S.T
 3. Riasinir Laraupetanelaria Talaga, S.S
 4. Ria Regina Talaga
 5. Riasinir Theresa Rina Talaga

Pontianak, Oktober 2010

Penulis,

ERICK YOHANES

E. 014945523